

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
SULAWESI SELATAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

- 2.1 DAERAH TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA
DINAS KESEHATAN
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS
DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
- 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja ini mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 dan juga mempertimbangkan hasil hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan bagian dari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan untuk satu tahun mendatang (tahun 2021) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dan menjadi pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.

Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2021 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bone dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Bone.

Watampone, Agustus 2021
Kepala Dinas Kesehatan

Dr. Hj. Nurminah A. Yusuf, M.Kes
NIP. 19641206 199903 2 002

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Penyelenggaraannya didasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Permasalahan kesehatan yang muncul dapat diselesaikan melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang bersinergi dan berkesinambungan.

Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD mempunyai tugas penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di unit pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Kualitas penyusunan Renja SKPD akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dilaksanakan program-program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan dan Rencana Kerja (RENJA).

Rencana kerja ini adalah dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan dan atau sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaian Indikator Kinerja dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Selanjutnya Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dengan dedikasi dan kerja keras terutama semua aparatur kesehatan di lingkup Kabupaten Bone.

1.2. Landasan Hukum

Terdapat beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang Renja SKPD khususnya dan perencanaan/ penganggaran daerah pada umumnya serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023. Dalam Renja juga diakomodir masukan yang diperoleh dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Ketercapaian Visi dan Misi tersebut sangat tergantung pada pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, yang juga akan berpengaruh pada pencapaian pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Bone Tahun 2021 sebagai bagian dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan sebagai berikut;

1. Menjadi acuan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan Kab. Bone pada Tahun 2021,
2. Menetapkan target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Bone sebagai acuan pengukuran realisasi capaian kinerja pada tahun 2020,
3. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan prioritas serta Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Bone dengan program dan kegiatan Pemerintah Kab. Bone yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja tahun 2021 ini disusun dengan sistematika berikut ini :

BAB I: Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Pelaksanaan pembangunan kesehatan pada tahun 2019 dapat berjalan dengan baik. Adapun realisasi keuangan sebesar 77,67% (232.188.962.164,-) dari total dana Rp. Rp. 298.937.773.196,-. Jumlah tersebut termasuk belanja tidak langsung (gaji), sedangkan realisasi khusus untuk belanja Langsung sebesar 77,06% (59.189.054.341,-) dari total belanja langsung sebesar Rp. Rp. 222.135.167.007,-.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis 2018-2023. Pada tahun 2019 alokasi dana ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan seperti penurunan angka kesakitan, melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya, yang terdiri atas Rehabilitasi Puskesmas sebanyak 3 unit (Puskesmas Tana Batu, Pacing dan Cenrana) , Penambahan / Pembangunan Puskesmas sebanyak 2 Unit (Pembangunan Puskesmas Dua Boccoe dan Penambahan Ruang Persalinan Puskesmas Koppe), Rehabilitasi PUSTU sebanyak 2 unit (Pustu Langi dan Pustu Watangcani Kec. Bontocani), pembangunan gedung Laboratorium Rumah Sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 837/ Menkes/ SK/ VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota telah ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) indikator yang harus dicapai hingga tahun 2019. Keseluruhan indikator tersebut mengacu pada kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB serta Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pengukuran kinerja pada sasaran tahun 2019 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar tujuan sudah dapat mencapai target yang diharapkan, bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tujuan dan Indikator Kesehatan 2018-2023

| TUJUAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA |
|--|---|--------|--------------|----------------------|
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Prosentase Balita Gizi Buruk | Persen | 0,33% | 0,28% |
| | Cakupan Desa / Kelurahan Sehat | Persen | 56% | 100% |
| | Persentase Balita Stunting | Persen | 7,52% | 7,27% |
| | Angka Kematian Bayi | Persen | 6,69 | 6,44 |
| | Angka Kematian Balita | Persen | 6,91 | 6,66 |
| | Angka Kematian Ibu | Persen | 67,3 | 63,00 |
| | Indeks Keluarga Sehat | Persen | 0,141 | 0,166 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan | Prosentase Fasilitas kesehatan dasar dan Rujukan yang terakreditasi | Persen | 78,95 | 100 |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja Urusan Kesehatan | Predikat Evaluasi SKIP oleh APIP | | C | BB |

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang Secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

| NO | SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN (%) |
|----|---|---|--------|-----------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan | Persentase Balita Gizi Buruk | 0,32 | 0,10 | 168,75 |
| | | Persentase Desa / Kelurahan Sehat (%) | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase Balita Stunting (%) | 7,47 | 5,93 | 120,61 |
| | | Angka Kematian Bayi | 6,56 | 0,52 | 192,07 |
| | | Angka Kematian Ibu | 67 | 8 | 188,05 |
| | | Angka Kematian Balita | 6,56 | 0,22 | 196,64 |
| | | Indeks Keluarga Sehat | 0,146 | 0,16 | 110 |
| | | Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD | 100 | 100 | 100 |
| | | Angka Kejadian Malaria (per 100 penduduk) | < 1 | 0,011 | 100 |
| | | Prevalensi HIV / AIDS (per 1000 penduduk) | < 0,05 | 0,06 | 80,01 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi | 100 | 100 | 100 |
| | | Indeks Kepuasan pasien | Baik | Baik | 100 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi | 100 | 90 | 100 |

Realisasi anggaran berdasarkan Program pada Tahun 2019 dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 1.133.058.700,- atau sebesar 80,2% dari Rp 1.411.541.460,-.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp 5.131.038.391,- atau sebesar 98,9% dari Rp. 5.184.103.126,-.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp 106.599.000,- atau sebesar 88,8% dari Rp 120.000.000,-.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 39.809.900,- atau sebesar 47,9% dari Rp 83.000.000,-.
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp 5.766.383.032 atau sebesar 98,1% dari Rp. 5.876.007.905,-.
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp 12.602.338.519,- atau sebesar 88,2% dari 14.286.520.500,-.
7. Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp 13.375.000,- atau sebesar 78,6% dari 17.000.000,-.
8. Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 31.674.087.599, atau sebesar 99,5% dari 31.823.000.000,-
9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat sebesar Rp. 654.612.180,- atau sebesar 81,5% dari Rp. 802.815.000,-
10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat sebesar Rp. 575.402.647 atau sebesar 78,1 % dari Rp. 736.643.000,-
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebesar Rp. 527.663.800,- atau sebesar 96,1% dari Rp. 548.866.000,-
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 2.087.295.143 atau sebesar 77,9% dari Rp. 2.676.730.000,-
13. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringan nya sebesar Rp. 15.454.747.634 atau sebesar 92,4% dari Rp. 16.720.396.672,-
14. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata sebesar Rp. 9.077.297.439 atau sebesar 98,6% dari Rp. 9.201.493.300,-
15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 84.722.165.789 atau sebesar 66,7% dari Rp. 126.963.105.044,-

16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia sebesar Rp. 4.400.00,-
atau sebesar 88% dari 5.000.000,-
17. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan sebesar
Rp. 9.934.250 atau sebesar 72,2% dari Rp. 13.750.000
18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak sebesar
Rp. 3.153.263.800 atau sebesar 58,6% dari Rp. 5.374.210.000,-
19. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
sebesar Rp. 266.435.000 atau sebesar 99,94% dari Rp. 266.585.000,-.

Realisasi (Fisik & Keuangan) Program dan Kegiatan secara rinci sebagai berikut :

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | PAGU | Realisasi | | | SISA DANA | SUMBER DANA | PERMASALAHAN |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|-------------|--------------|
| | | | Keuangan (Rp) | Keuangan (%) | Fisik (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PENDAPATAN | | 10.538.899.600 | 6.696.439.504 | 63,54 | 75,00 | 3.842.460.096 | PAD | |
| | RETRIBUSI JASA UMUM | 10.538.899.600 | 6.696.439.504 | 63,54 | 75,00 | 3.842.460.096 | PAD | |
| | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 10.538.899.600 | 6.696.439.504 | 63,54 | 75,00 | 3.842.460.096 | PAD | |
| BELANJA DAERAH | | 298.937.773.196 | 227.727.041.916 | 74,96 | 84,02 | 72.326.631.279 | | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | | 76.802.606.189 | 54.727.134.093 | 71,26 | 75,00 | 22.075.472.096 | DAU | |
| | BELANJA PEGAWAI | 76.802.606.189 | 54.727.134.093 | 71,26 | 75,00 | 22.075.472.096 | DAU | |
| | Gaji dan Tunjangan | 76.802.606.189 | 54.727.134.093 | 71,26 | 75,00 | 22.075.472.096 | DAU | |
| BELANJA LANGSUNG | | 222.135.167.007 | 172.999.907.823 | 78,67 | 93,03 | 50.251.159.183 | DAU | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.411.541.460 | 1.133.058.700 | 82,26 | 86,88 | 278.482.760 | DAU | |
| | Penyediaan Jasa - Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 227.440.000 | 180.605.272 | 79,41 | 75,00 | 46.834.728 | DAU | |
| | - Penyediaan Jasa | 292.000.000 | 229.372.280 | 78,55 | 80,00 | 62.627.720 | DAU | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------|--------|------------|--------------|--|
| | Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | | | | | | | |
| | - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 281.222.400 | 268.899.080 | 95,62 | 100,00 | 12.323.320 | DAU | |
| | - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 16.050.000 | 12.000.000 | 74,77 | 75,00 | 4.050.000 | DAU | |
| | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.125.000 | 5.125.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAU | |
| | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 10.000.000 | 9.950.000 | 99,50 | 100,00 | 50.000 | DAU | |
| | - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | 450.000.000 | 362.776.500 | 80,62 | 90,00 | 87.223.500 | DAU | |
| | - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 129.704.060 | 64.330.568 | 49,60 | 75,00 | 65.373.492 | DAU | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 5.184.103.126 | 5.131.038.391 | 76,66 | 93,75 | 53.064.735 | DAK, DAU, PR | |
| | - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 157.700.000 | 149.129.265 | 94,57 | 100,00 | 8.570.735 | DAK | |
| | - Pengadaan Mebeleur | 14.400.000 | 14.400.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | - Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | 43.500.000 | 5.300.000 | 12,18 | 75,00 | 38.200.000 | DAU | |
| | - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 4.968.503.126 | 4.962.209.126 | 99,87 | 100,00 | 6.294.000 | P.Rokok | |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--------|--------|---------------|----------|--|
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 120.000.000 | 106.599.000 | 87,26 | 90,00 | 13.401.000 | DAU | |
| | - Peningkatan Sumber Daya Kesehatan | 50.000.000 | 38.899.000 | 77,80 | 80,00 | 11.101.000 | DAK | |
| | - Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional | 70.000.000 | 67.700.000 | 96,71 | 100,00 | 2.300.000 | DAK | |
| 4 | Program Pening. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 83.000.000 | 39.809.900 | 46,80 | 100,00 | 43.190.100 | DAU | |
| | - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 33.000.000 | 13.577.600 | 41,14 | 100,00 | 19.422.400 | DAU | |
| | - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan | 50.000.000 | 26.232.300 | 52,46 | 100,00 | 23.767.700 | DAU | |
| 5 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 5.876.007.905 | 5.766.383.032 | 93,76 | 100,00 | 109.624.873 | DAK, DAU | |
| | - Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan | 5.381.049.690 | 5.280.570.295 | 98,13 | 100,00 | 100.479.395 | DAK | |
| | - Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan | 22.000.000 | 18.555.000 | 84,34 | 100,00 | 3.445.000 | DAU | |
| | - Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (Utang) | 472.958.215 | 467.257.737 | 98,79 | 100,00 | 5.700.478 | DAK, DAU | |
| 6 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 14.286.520.500 | 12.602.338.519 | 96,80 | 110,00 | 1.684.181.981 | DAK, DAU | |
| | - Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan | 70.000.000 | 70.000.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAU | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--------|--------|-------------|-----|--|
| | - Peningkatan Kesehatan Masyarakat | 2.062.000.000 | 1.249.429.111 | 60,59 | 100,00 | 812.570.889 | DAK | |
| | - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (Utang) | 32.355.000 | 32.355.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAU | |
| | - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana | 10.580.000 | 9.720.000 | 91,87 | 100,00 | 860.000 | DAU | |
| | - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan | 1.777.428.500 | 1.452.229.512 | 81,70 | 100,00 | 325.198.988 | DAU | |
| | - Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan | 11.000.000 | 9.950.000 | 90,45 | 100,00 | 1.050.000 | DAU | |
| | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 400.000.000 | 323.070.000 | 80,77 | 100,00 | 76.930.000 | DAK | |
| | - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Pusat-Pusat Rujukan dan Instalasi Medis | 74.000.000 | 65.560.000 | 88,59 | 100,00 | 8.440.000 | DAU | |
| | - Penyediaan Biaya Operasional / Pemeliharaan Rumah Sakit | 9.789.280.000 | 9.336.197.896 | 95,37 | 100,00 | 453.082.104 | DAU | |
| | - Pembinaan Kesehatan Tradisional | 46.000.000 | 41.580.000 | 90,39 | 100,00 | 4.420.000 | DAU | |
| | - Upaya Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat | 13.877.000 | 12.247.000 | 88,25 | 100,00 | 1.630.000 | DAU | |
| 7 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | 17.000.000 | 13.375.000 | 78,68 | 80,00 | 3.625.000 | DAU | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|----------------|--------|--------|---------------|----------|--|
| | - | Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/masyarakat Di Bidang Obat Dan Makanan | 17.000.000 | 13.375.000 | 78,68 | 80,00 | 3.625.000 | DAU | |
| 8 | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 31.823.000.000 | 31.674.087.599 | 99,33 | 100,00 | 1.264.812.400 | DAK, DAU | |
| | - | Pengembangan Media Promosi Informasi Sadar Hidup Sehat | 100.000.000 | 99.985.600 | 99,99 | 100,00 | 14.400 | DAU | |
| | - | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) (DAK Non Fisik) | 207.000.000 | 206.975.000 | 99,99 | 100,00 | 25.000 | DAK | |
| | - | Pembinaan UKS, Dokcil, Kader Kesehatan Remaja, Sekolah Sehat | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAU | |
| | - | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (DAK Non Fisik) | 31.496.000.000 | 31.347.126.999 | 97,34 | 100,00 | 1.264.773.000 | DAK | |
| | | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Ajangale) | 828.290.000 | 828.290.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | | Peningkatan Upaya Kesehatan | 687.548.000 | 687.548.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|--------|--------|------------|-----|--|
| | Bersumberdaya Masyarakat (PKM Awaru) | | | | | | | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Bajoe) | 850.217.000 | 850.217.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Bakunge) | 598.660.000 | 596.760.000 | 99,68 | 100,00 | 1.900.000 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Barebbo) | 766.460.000 | 766.460.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Biru) | 949.304.000 | 949.304.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Bonto Cani) | 1.246.140.000 | 1.245.620.000 | 99,96 | 100,00 | 520.000 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Cenrana) | 1.064.518.000 | 1.040.088.000 | 97,71 | 100,00 | 24.430.000 | DAK | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--------|--------|---------------|-----|--|
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Cina) | 1.034.150.000 | 1.008.087.000 | 97,48 | 100,00 | 26.063.000 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Dua Bocoe) | 802.798.000 | 795.238.000 | 99,06 | 100,00 | 7.560.000 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Gaya Baru) | 1.294.411.000 | 129.261.000 | 9,99 | 100,00 | 1.165.150.000 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Kading) | 567.555.000 | 567.555.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Kahu) | 898.691.000 | 898.691.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Kajuara) | 1.193.060.000 | 1.193.060.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM | 910.904.000 | 910.904.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|--------|--------|------------|-----|--|
| | Koppe) | | | | | | | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Lamuru) | 1.091.070.000 | 1.091.070.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Lamurukung) | 642.140.000 | 640.701.000 | 99,78 | 100,00 | 1.439.000 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Lappariaja) | 840.998.000 | 840.998.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Libureng) | 994.205.000 | 994.205.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Lonrong) | 660.564.000 | 660.564.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Mare) | 1.046.110.000 | 1.027.010.000 | 98,17 | 100,00 | 19.100.000 | DAK | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|--------|--------|------------|-----|--|
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Pacing) | 628.595.000 | 628.595.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Palakka) | 602.990.000 | 602.990.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Palakka Kahu) | 713.683.000 | 713.683.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Patimpeng) | 731.350.000 | 731.350.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Pattiro Mampu) | 846.023.000 | 846.023.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Salomekko) | 679.010.000 | 679.010.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan | 945.023.000 | 994.078.000 | 105,19 | 100,00 | 49.055.000 | DAK | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|--------|--------|------------|-----|--|
| | Bersumberdaya Masyarakat (PKM Sibulue) | | | | | | | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Sumaling) | 518.240.000 | 515.115.000 | 99,40 | 100,00 | 3.125.000 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Tanabatue) | 685.583.000 | 685.583.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Taretta) | 1.034.946.000 | 987.726.000 | 95,44 | 100,00 | 47.220.000 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Tellu Siattinge) | 818.884.000 | 818.884.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Timurung) | 419.194.000 | 419.194.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM | 887.659.000 | 887.659.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|--------|--------|-------------|----------|--|
| | Tonra) | | | | | | | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Tunreng Tellue) | 530.672.000 | 518.042.000 | 97,62 | 100,00 | 12.630.000 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Ulaweng) | 971.791.000 | 971.791.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Usa) | 654.654.000 | 650.863.000 | 99,42 | 100,00 | 3.791.000 | DAK | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (PKM Watampone) | 859.910.000 | 859.010.000 | 99,90 | 100,00 | 900.000 | DAK | |
| 9 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 802.815.000 | 654.612.180 | 91,52 | 100,00 | 148.202.820 | DAU | |
| | - Penanggulangan KEP, GAKY dll | 17.575.000 | 17.575.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAU | |
| | - Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Program Gizi | 35.240.000 | 33.140.000 | 94,04 | 100,00 | 2.100.000 | DAU | |
| | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 750.000.000 | 603.897.180 | 80,52 | 100,00 | 146.102.820 | DAU | |
| 10 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 736.643.000 | 575.402.647 | 88,07 | 100,00 | 161.240.353 | DAU, DAK | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|--------|--------|-------------|-------------|--|
| | - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat | 40.800.000 | 38.900.000 | 95,34 | 100,00 | 1.900.000 | DAU | |
| | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 206.000.000 | 197.811.000 | 96,02 | 100,00 | 8.189.000 | DAU | |
| | - Operasional Laboratorium Pemeriksaan Kualitas air dan lingkungan | 389.843.000 | 239.116.450 | 61,34 | 100,00 | 150.726.550 | DAK | |
| | - Penyelenggaraan Kabupaten Sehat | 100.000.000 | 99.575.197 | 99,58 | 100,00 | 424.803 | DAU | |
| 11 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 548.866.000 | 527.663.800 | 97,16 | 100,00 | 21.202.200 | DAU, DAK | |
| | - Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk | 57.866.000 | 57.865.800 | 100,00 | 100,00 | 200 | DAU | |
| | - Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular | 241.000.000 | 239.150.000 | 99,23 | 100,00 | 1.850.000 | DAK | |
| | - Peningkatan Surveillance Epideminologi Dan Penaggulangan Wabah | 250.000.000 | 230.648.000 | 92,26 | 100,00 | 19.352.000 | DAK | |
| 12 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 2.676.730.000 | 2.087.295.143 | 68,47 | 100,00 | 589.434.857 | DAU | |
| | - Penyusunan Standar Kesehatan (DAK Non Fisik) | 2.618.650.000 | 2.053.305.143 | 78,41 | 100,00 | 565.344.857 | DAU | |
| | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 58.080.000 | 33.990.000 | 58,52 | 100,00 | 24.090.000 | DAU | |
| 13 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk | 24.400.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24.400.000 | DAU | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--|
| | Miskin | | | | | | | |
| | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 24.400.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24.400.000 | DAU | |
| 14 | Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | 16.720.396.672 | 15.454.747.634 | 72,77 | 100,00 | 1.265.649.038 | DAU | |
| | - Pembangunan Puskesmas | 3.172.200.000 | 3.054.722.106 | 96,30 | 100,00 | 117.477.894 | DAK | |
| | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas | 13.050.046.672 | 11.926.976.944 | 91,39 | 100,00 | 1.123.069.728 | DAK, DAU, PR | |
| | - Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu | 446.000.000 | 437.398.584 | 98,07 | 100,00 | 8.601.416 | PR | |
| | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 45.650.000 | 35.650.000 | 78,09 | 100,00 | 10.000.000 | DAU | |
| | - Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Utang) | 6.500.000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 6.500.000 | DAK | |
| 15 | Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | 9.201.493.300 | 9.077.297.439 | 99,30 | 100,00 | 124.195.861 | DAK, PR | |
| | - Pembangunan Rumah Sakit | 1.085.159.000 | 1.083.456.300 | 99,84 | 100,00 | 1.702.700 | PR | |
| | - Pengadaan Alat - Alat Rumah Sakit | 6.300.273.300 | 6.177.780.139 | 98,06 | 100,00 | 122.493.161 | DAK | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|----------------|--------|--------|----------------|----------|--|
| | - Pengadaan Perlengkapan RT Rumah Sakit (Dapur, Laundry dll) | 1.816.061.000 | 1.816.061.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | PR | |
| 16 | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 126.963.105.044 | 84.722.165.789 | 83,26 | 100,00 | 42.240.939.255 | BPJS | |
| | - Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat | 126.139.760.044 | 83.898.820.789 | 66,51 | 100,00 | 42.240.939.255 | BPJS | |
| | - Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat (Utang) | 823.345.000 | 823.345.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | BPJS | |
| 17 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 5.000.000 | 4.400.000 | 88,00 | 100,00 | 600.000 | DAU | |
| | - Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Lansia | 5.000.000 | 4.400.000 | 88,00 | 100,00 | 600.000 | DAU | |
| 18 | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | 13.750.000 | 9.934.250 | 72,25 | 100,00 | 3.815.750 | DAU | |
| | - Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri | 13.750.000 | 9.934.250 | 72,25 | 100,00 | 3.815.750 | DAU | |
| 19 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 5.374.210.000 | 3.153.263.800 | 51,15 | 100,00 | 2.220.946.200 | DAU, DAK | |
| | - Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK Non Fisik) | 5.126.000.000 | 3.072.723.800 | 59,94 | 100,00 | 2.053.276.200 | DAK | |
| | - Pelayanan Audit | 41.210.000 | 28.090.000 | 68,16 | 100,00 | 13.120.000 | DAU | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|--|
| | Maternal Perinatal (AMP) tingkat Kabupaten | | | | | | | |
| | - Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 207.000.000 | 52.450.000 | 25,34 | 100,00 | 154.550.000 | DAK | |
| 20 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | 266.585.000 | 266.435.000 | 99,86 | 100,00 | 150.000 | DAU, DAK | |
| | - Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM | 36.770.000 | 36.620.000 | 99,59 | 100,00 | 150.000 | DAU | |
| | - Pelayanan Kesehatan Indera dan Fungsional | 29.815.000 | 29.815.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAU | |
| | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 200.000.000 | 200.000.000 | 100,00 | 100,00 | 0 | DAK | |
| | TOTAL | 222.135.167.007 | 172.999.907.823 | 78,67 | 93,03 | 50.251.159.183 | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari data capaian Indikator Sasaran / program yang masuk dalam indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2019 di Kabupaten Bone sebagai berikut :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

| No | Kegiatan | Sasaran | Realisasi | Capaian |
|----|--|---------|-----------|---------|
| 1 | Pely. Kes Ibu Hamil sesuai Standar Pelayanan Antenatal | 14.789 | 14.752 | 100 |
| 2 | Pelay. Kes Ibu Bersalin | 14.116 | 12.350 | 87,5 |
| 3 | Pelay. Kes Bayi Baru Lahir | 13.086 | 13.075 | 99,9 |
| 4 | Pely. Kes Balita | 98.384 | 69.144 | 70,3 |
| 5 | Pelay. Kes pada Usia Pendidikan Dasar | 80.500 | 31.998 | 39,7 |
| 6 | Pelay. Kes pada Usia Produktif | 432.123 | 109.168 | 25,3 |
| 7 | Pely. Kes Usia Lanjut | 68.339 | 49.148 | 71,9 |
| 8 | Pelay. Kes Penderita Hipertensi | 158.516 | 21.752 | 13,7 |
| 9 | Pely. Kes Penderita DM | 11.902 | 6.264 | 52,6 |
| 10 | Pely. Kes pada Orang Gangguan Jiwa Berat | 1.718 | 1.075 | 62,6 |
| 11 | Pely. Kes pada penderita TB | 12.522 | 12.522 | 100 |
| 12 | Pely. Kes Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV | 5.160 | 5.160 | 100 |

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar Pelayanan Antenatal

Pengukuran terhadap capaian indikator ini ditujukan untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA untuk melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin dan ibu terjamin. Pelayanan Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan

atau dokter atau dokter spesialis kebidanan. Pada tahun 2019 sebesar 13.803 dari total 14.788 ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar sehingga Hasil realisasi indikator Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar sebesar 93,0 %. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi adalah dengan memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya dipuskesmas.

- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan atau dokter dan atau dokter spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta maupun pemerintah. Adapun persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada tahun 2019 terealisasi 87,5% dengan jumlah ibu bersalin 13.123 yang ditolong oleh tenaga nakes dan semuanya mendapatkan pelayanan sesuai standar. Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar diantaranya dengan melakukan kunjungan rumah, sosialisasi persalinan selamat, kerjasama dengan klinik swasta atau praktek mandiri, mengoptimalkan pelayanan PONED dan PONEK.

- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau dokter atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Adapun hasil persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar di tahun 2019 sebesar 9,9% dari jumlah 13.184 bayi baru lahir keseluruhnya mendapatkan pelayanan sesuai standar. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pelayanan tindakan resusitasi, pencegahan hipotermia, pemberian ASI melalui IMD dan ASI Eksklusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, talipusat, pemberian imunisasi, pemberian vitamin K, Manajemen terpadu balita Muda dan penyuluhan perawatan neonates dirumah menggunakan buku KIA.

- Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh bidan dan atau perawat dan atau dokter yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun dengan pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun dan pemberian imunisasi dasar lengkap. Pada tahun 2019 Realisasi persentase Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 67,47% dengan jumlah balita 98.384 dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 66.384. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan peran kader dan masyarakat untuk ikut berperan dalam partisipasi bidang kesehatan dan melakukan sosialisasi tentang kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat.

- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkauan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan Puskesmas. Standar pelayanan yang diberikan meliputi : penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia), penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas), Penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen, dan penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala. Pada tahun 2019 persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 20,3 % dengan jumlah siswa yang dilakukan pemeriksaan seluruhnya sebanyak 28.064 siswa. Adapun tujuan dari skrining ini adalah untuk mendeteksi sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit peserta didik sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan melalui sweeping serta penjadwalan ulang bagi siswa yang tidak mengikuti pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan

- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh dokter, bidan, perawat, tenaga gizi dan petugas pelaksana Posbidu terlatih yang dilakukan di Puskesmas dan jaringannya dengan pemerinsaan minimal satu tahun sekali. Pelayanan yang diberikan adalah deteksi kemungkinan obesitas, deteksi hipertensi, deteksi kemungkinan Diabetes Melitus, deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, pemeriksaan ketajaman penglihatan, ketajaman pendengaran, dan deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan IVA khusus untuk wanita usia subur yang berusia 30-59 tahun. Pada tahun 2019 persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar mencapai 25,26% dengan sasaran sejumlah 432.123 orang dan yang mendapatkan skrening kesehatan sesuai standar sebanyak 109.168 orang.

- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis. pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada $<140/90$ mmhg untuk usia di bawah 60 tahun dan $<150/90$ mmhg untuk usia 60 tahun keatas sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes mellitus dan penyakit gagal ginjal kronis. Pada tahun 2019 persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 13,7% dengan sasaran 158.516 orang penderita hipertensi dan 21.752 orang penderita telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

- Pelayanan Kesehatan Penderita DM

Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di Kabupaten Bone. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau disebut dnegan penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard an upaya promotif dan preventif Di FKTP. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus diberikan di FKTP sesuai standar meliputi edukasi, aktifitas Fisik, Terapi Nutrisi Medis dan Intervensi farmakologis. Pelayanan kesehatan ini diberikan sesuai kewenangan oleh dokter, perawat dan tenaga gizi. Pada Tahun 2019 persentase penderita diabetes mellitus mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 52,6% dengan sasaran 11.902 orang penderita DM dan 6.264 telah mendapatkan sesuai standar.

- Pelayanan Kesehatan pada Orang Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan atau tindakan kebersihan diri ODGJ Berat. Pada Tahun 2019 Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 64,5% dari sasaran 1.718 penderita ODGJ dan 1.109 telah mendapat pelayanan sesuai standar.

- Pelayanan Kesehatan pada penderita TB

Penyakit Tuberkulosis (TB) terdiri TB paru dan TB Ekstra Paru. TB paru terdiri dari TB BTA (+) dan BTA (-) / Rontgen (+). TB BTA (+) adalah TB paru dengan hasil pemeriksaan mikroskopis BTA positif. Potensi menularkan penyakit TB pada kasus TB BTA (+) lebih besar dibanding TB BTA (-), Satu orang pasien TB dengan hasil BTA (+) apabila tidak mendapatkan pengobatan dapat menularkan ke orang-orang disekitarnya antara 5 sampai 15 orang pertahun. Pada tahun 2019 Persentase penderita TB Paru yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar mencapai 100% dengan jumlah penderita 1286 penderita TB. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan angka konversi penderita TB Paru dengan memberikan motivasi penderita oleh PMO dan petugas kesehatan dalam hal kepatuhan minum obat.

- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Jumlah orang terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes pada tahun 2019 sebesar 51 orang, dan seluruh orang yang beresiko telah mendapatkan pemeriksaan HIV AIDS sehingga jumlah realisasi di Tahun 2018 sebesar 100%.

Dalam pencapaian sasaran tersebut diatas, banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang menyebabkan belum tercapainya target yang telah ditentukan. Kendala / hambatan tersebut antara lain adalah :

1. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman
2. Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah usia kehamilan trimester 2 ke atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan sehingga tidak termonitor kesehatannya sehingga mem[ungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan.
3. Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang yang dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk.
4. Proses akreditasi merupakan rangkaian yang panjang dan memakan waktu yang lama mulai dari pelatihan hingga dapat terakreditasi.

Keberhasilan capaian indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Kesadaran individu, kelompok dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat semakin meningkat, yang diwujudkan dengan adanya kesepakatan masyarakat dalam bentuk deklarasi antara lain Deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan RW Kawasan Bebas Asap Rokok (KBAR). Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan adanya peningkatan rumah tangga yang ber PHBS meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
- b. Adanya dukungan kebijakan anggaran yang cukup untuk menjamin kesehatan penduduk miskin dan rentan miskin di Kabupaten Bone
- c. Adanya dukungan kebijakan pelaksanaan Jamkesda.
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Puskesmas sudah cukup memadai, ditambah dengan tenaga kontrak medis, paramedis, apoteker, komputer, akutansi dan administrasi di masing-masing Puskesmas.
- e. Kondisi sarana dan prasarana di Puskesmas semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bangunan beberapa Puskesmas yang lebih baik dengan adanya pembangunan kembali gedung Puskesmas.
- f. Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan di Puskesmas (medis dan paramedis) melalui forum konsultasi dengan dokter spesialis dilaksanakan secara terintegrasi antar program.

- g. Puskesmas dan Rumah Sakit melaporkan setiap kasus yang berpotensi KLB secara cepat.
- h. Peran aktif petugas surveilans dalam menemukan kasus potensial KLB sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
- i. Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kelurahan.
- j. Pembinaan pada industri rumah tangga makanan dan minuman melalui penyuluhan / pelatihan dapat memotivasi para pengusaha industri rumah tangga untuk melakukan kegiatan / proses produksi dengan didasari Higiene Sanitasi Personal maupun lingkungan sehingga akan mengeluarkan produk makanan & minuman yang bersih dan sehat sesuai standart kesehatan.
- k. Ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan yang tersedia sudah cukup untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

Hasil analisis kinerja pelayanan dinas Kesehatan pada tahun 2019 disajikan dalam tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

| NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|----------------------|-----|--------|--------|--------|-------------------|----------|--------|------------------|
| | | | | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar Pelayanan Antenatal | | | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 14.303 | 15.200 | 15.200 | |
| | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | 14.509 | 14.509 | 14.509 | 13.438 | 14.509 | 14.509 | |
| | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | 13.818 | 13.818 | 13.818 | 13.492 | 13.818 | 13.818 | |
| | Pelayanan Kesehatan Balita | | | 97.321 | 97.321 | 97.321 | 68.385 | 97.321 | 97.321 | |
| | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | 21.631 | 21.631 | 21.631 | 21.631 | 21.631 | 21.631 | |
| | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | |
| | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | 35.658 | 35.658 | 35.658 | 35.658 | 35.658 | 35.658 | |
| | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | 20.129 | 20.129 | 20.129 | 20.129 | 20.129 | 20.129 | |
| | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus | | | 7.213 | 7.213 | 7.213 | 7.213 | 7.213 | 7.213 | |
| | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.061 | 1.090 | 1.090 | |
| | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis | | | 926 | 926 | 926 | 1.223 | 926 | 926 | |
| | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV | | | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 14.303 | 15.200 | 15.200 | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya, disamping tanggung jawab individu dan keluarga.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bone sampai pada tahun 2019 telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator

yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan itu sendiri. Tercapainya beberapa target pada indikator kunci yang ditetapkan memang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan kesehatan. Misalnya angka kematian bayi dan balita serta angka kematian ibu yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun berbagai capaian yang sudah diperoleh, tentunya bukan suatu hal yang membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Bone harus berpuas diri tetapi harus tetap terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan yang ada.

Isu penting yang masih menjadi permasalahan kesehatan sampai tahun 2019 adalah masih seringnya terjadi kasus DBD. Disamping upaya dan fokus yang serius untuk menurunkan Kasus Gizi Buruk, AKB (angka kematian bayi), AKABA (angka kematian balita) dan AKI (angka kematian ibu) sampai tingkat yang serendah-rendahnya Sampai saat ini permasalahan angka kesakitan (morbiditas) masih belum stabil, munculnya beberapa penyakit baru semakin menambah beban Dinas Kesehatan disamping itu terdapat isu baru tentang stunting yang menjadi prioritas utama bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.

A. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Hasil analisis perkembangan dan masalah kesehatan selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bone serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

(1) Upaya Kesehatan

- a) Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah berjalan pada jalurnya, namun masih kurang maksimal. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya beberapa cakupan pelayanan kesehatan.
- b) Penanganan dan penanggulangan terhadap penyakit menular telah dilaksanakan walau belum maksimal. Masih tingginya penderita penyakit malaria dan TB Paru diharapkan menjadi perhatian. Penyakit yang tidak menular juga diharapkan mendapat perhatian karena jumlah penderitanya meningkat setiap tahun (Ispe, Hypertensi dan sebagainya).
- c) Upaya Promotif dan Preventif masih sangat kurang digalakkan. Promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.

- d) Visi sehat pada masa mendatang akan bertumpu kepada pencapaian Desa Sehat yang dimulai pada lingkup keluarga. Strategi khusus yang telah dikembangkan di Kabupaten Bone melalui Desa/Kelurahan Siaga untuk mendukung upaya penanganan berbagai masalah kesehatan dengan basis UKBM. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dalam tataran konseptual dan belum memiliki kemandirian manajerial yang memadai untuk mendukung peningkatan aksesibilitas pelayanan.
- e) Penduduk kabupaten Bone masih ada yang belum tercakup dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), hal ini disebabkan masih ada sebagian besar masyarakat yang tidak mampu untuk membayar iuran, olehnya itu masih perlu dipikirkan untuk perbaikan data kepesertaan serta mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

(2) Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a) Jumlah tenaga kesehatan secara umum masih kurang, termasuk dokter, tenaga farmasi, tenaga analis kesehatan, tenaga gizi dan kesehatan lingkungan dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini akan menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan.
- b) Ketersediaan tenaga kesehatan yang ada tidak merata. Masih ada beberapa Puskesmas yang belum memiliki dokter serta jenis tenaga kesehatan lainnya.
- c) Kurang berjalannya beberapa program/ kegiatan juga disebabkan rendahnya kualitas SDM kesehatan.

(3) Manajemen Kesehatan

- b) Dalam pelaksanaan manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ evaluasi masih belum terlaksana dengan

baik. Keterbatasan kemampuan dan jumlah SDM kesehatan menjadi penyebabnya.

- c) Kerja sama lintas program dan lintas sektor sangat dibutuhkan demi berjalannya pembangunan kesehatan yang terarah dan terpadu. Kondisi selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa ada tujuan yang jelas. Pembangunan yang dilakukan sektor lain pun cenderung mengabaikan “pembangunan berwawasan kesehatan”. Kerjasama antar wilayah (lintas batas) juga perlu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan - permasalahan kesehatan disekitar batas wilayah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2020 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018 - 2023, SDG's dan SPM-Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun sebelumnya. Ada perubahan jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD karena dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|--------|--|----------------|----------------|--|--------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu indikatif | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1.272.032.460 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Dinkes | | | 1.411.541.460 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Dinkes | Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 217.440.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Dinkes | Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 227.440.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | Dinkes | Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Perkantoran | 35 | 263.500.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | Dinkes | Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Perkantoran | 35 | 292.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Dinkes | Jumlah Pegawai yang mendapat jasa bulanan sebagai tenaga pengelola administrasi keuangan | 93 | 217.622.400 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Dinkes | Jumlah Pegawai yang mendapat jasa bulanan sebagai tenaga pengelola administrasi keuangan | 93 | 281.222.400 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|-----|----------------------|--|--------|---|-----|----------------------|--|
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Dinkes | Prosentase ketersediaan alat kebersihan dan jumlah cleaning service yang mendapat upah bulanan | 100 | 16.050.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Dinkes | Prosentase ketersediaan alat kebersihan dan jumlah cleaning service yang mendapat upah bulanan | 100 | 16.050.000 | |
| | Penyediaan Komponen Inst Listrik/Penerangan Bang. Kantor | Dinkes | Prosentase ketersediaan alat/isntalasi listrik dan penerangan bangunan kantor | 100 | 5.125.000 | Penyediaan Komponen Inst Listrik/Penerangan Bang. Kantor | Dinkes | Prosentase ketersediaan alat/isntalasi listrik dan penerangan bangunan kantor | 100 | 5.125.000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | Dinkes | Jumlah Bahan bacaan majalah/surat kabar yang tersedia | 100 | 10.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | Dinkes | Jumlah Bahan bacaan majalah/surat kabar yang tersedia | 100 | 10.000.000 | |
| | Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi dalam & Luar Daerah | Dinkes | Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 100 | 450.000.000 | Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi dalam & Luar Daerah | Dinkes | Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 100 | 450.000.000 | |
| | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Dinkes | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor, biaya cetak, dan penggandaan serta tersdianya makanan dan minuman rapat, tamu, dan pegawai | 100 | 92.295.060 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor, biaya cetak, dan penggandaan serta tersdianya makanan dan minuman rapat, tamu, dan pegawai | 100 | 129.704.060 | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 5.463.940.000 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 5.184.103.126 | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | | | | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | RS | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|-----|--------------------|--|---------------|---|-----|--------------------|--|
| | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Dinkes/PKM/RS | | | | |
| | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Dinkes /PKM /RS | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 100 | 308.000.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Dinkes/PKM/RS | Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 100 | 157.700.000 | |
| | Pengadaan Mebeleur | Dinkes /PKM /RS | Pengadaan Almari (6 Unit), Meja (33 Unit) dan Kursi (33 Unit) | 100 | | Pengadaan Mebeleur | Dinkes | Pengadaan Almari (6 Unit), Meja (33 Unit) dan Kursi (33 Unit) | 100 | 14.400.000 | |
| | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Dinkes | Jumlah ruangan yang diperbaiki, dicat dan di tata ulang | 100 | 43.500.000 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | Dinkes | Jumlah ruangan yang diperbaiki, dicat dan di tata ulang | 100 | 43.500.000 | |
| | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Dinkes | Jumlah alat elektronik yang mendapat biaya pemeliharaan (Komputer, AC dan Video Tron) | 100 | 0 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Dinkes | Jumlah alat elektronik yang mendapat biaya pemeliharaan (Komputer, AC dan Video Tron) | 100 | 0 | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Dinkes | Jumlah PKM, Rumdis dan Pagar Gudang Farmasi secara Optimal | 100 | 5.112.440.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | Jumlah PKM, Rumdis dan Pagar Gudang Farmasi secara Optimal | 100 | 4.968.503.126 | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 120.000.000 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Dinkes | | | 120.000.000 | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Dinkes | Jumlah pegawai yang mengikuti Diklatpim dan Bimtek lainnya | 75 | - | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | PKM | Jumlah pegawai yang mengikuti Diklatpim dan Bimtek lainnya | 75 | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-----|----------------------|---|-------------|--|-----|----------------------|--|
| | Peningkatan Sumber Daya Kesehatan | PKM | Jumlah Sistem informasi / Aplikasi SDM | 100 | 50.000.000 | Peningkatan Sumber Daya Kesehatan | Dinkes/PKM | Jumlah Sistem informasi / Aplikasi SDM | 100 | 50.000.000 | |
| | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional | Dinkes /PKM | Jumlah pegawai yang menjadi TIM penilai dan timp penetapan angka kredit jabatan fungsional | 100 | 70.000.000 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional | Dinkes | Jumlah pegawai yang menjadi TIM penilai dan timp penetapan angka kredit jabatan fungsional | 100 | 70.000.000 | |
| | Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes | Jumlah PKM yang mendapat Dana BOK | 100 | | Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan | | Jumlah PKM yang mendapat Dana BOK | 100 | | |
| | Program Pening. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 83.000.000 | Program Pening. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Dinkes | | | 83.000.000 | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinkes | Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun (RKA, DPA, DPA partial, LPPD, LAKIP, DPPA) | 100 | 33.000.000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun (RKA, DPA, DPA partial, LPPD, LAKIP, DPPA) | 100 | 33.000.000 | |
| | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan | Dinkes | Jumlah Rencana Kerja Yang tersusun | 100 | 50.000.000 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan | Dinkes | Jumlah Rencana Kerja Yang tersusun | 100 | 50.000.000 | |
| | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | | | | 5.535.430.000 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Farmasi/PKM | | | 5.403.049.690 | |
| | Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan | Farmasi/PKM | Prosentase ketersediaan obat di RS, PKM dan PUSTU | 100 | 5.513.430.000 | Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan | Farmasi/PKM | Prosentase ketersediaan obat di RS, PKM dan PUSTU | 100 | 5.381.049.690 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-----|----------------|---|-------------|--|-----|----------------|--|
| | Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan | Farmasi/PKM | Jumlah pengelola obat di PKM, PUSTU dan Poskesdes yang mendapat pembinaan pengelola obat | 75 | 22.000.000 | Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan | | Jumlah pengelola obat di PKM, PUSTU dan Poskesdes yang mendapat pembinaan pengelola obat | 75 | 22.000.000 | |
| | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | 13.969.577.000 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | 14.253.665.500 | |
| | Revitalisasi Sistem Kesehatan | | | | | Revitalisasi Sistem Kesehatan | Farmasi/PKM | | | | |
| | Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan | Farmasi/PKM | Jumlah pengurus barang/Alkes yang mendapat bimbingan pengelolaan Alkes | 75 | 70.000.000 | Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan | | Jumlah pengurus barang/Alkes yang mendapat bimbingan pengelolaan Alkes | 75 | 70.000.000 | |
| | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | | | | 2.062.000.000 | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Dinkes | | | 2.062.000.000 | |
| | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana | Dinkes | Prosentase penanganan korban bencana yang terjadi | 90 | 10.580.000 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana | Dinkes | Prosentase penanganan korban bencana yang terjadi | 90 | 10.580.000 | |
| | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan | | | | | Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan | Dinkes | | | | |
| | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan | Dinkes | Ketersediaan biaya operasional / pemeliharaan UPTD | 100 | 2.282.620.000 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan | Dinkes | Ketersediaan biaya operasional / pemeliharaan UPTD | 100 | 1.777.428.500 | |
| | Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan | Dinkes | | 100 | 11.000.000 | Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan | Dinkes | | 100 | 11.000.000 | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes | Terlaksananya Program PIS-PK, Kestrad, P2 dan Kesmas | 90 | 400.000.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes | Terlaksananya Program PIS-PK, Kestrad, P2 dan Kesmas | 90 | 400.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|-----|---------------|---|--------|---|-----|---------------|--|
| | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Pusat-Pusat Rujukan dan Instalasi Medis | Dinkes | Jumlah Sarana kesehatan rujukan yang mendapat ijin operasional | 100 | 74.000.000 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Pusat-Pusat Rujukan dan Instalasi Medis | | Jumlah Sarana kesehatan rujukan yang mendapat ijin operasional | 100 | 74.000.000 | |
| | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut | | | | - | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut | Dinkes | | | - | |
| | Pelayanan Kesehatan Jiwa | Dinkes | Jumlah PKM yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa | 100 | - | Pelayanan Kesehatan Jiwa | Dinkes | Jumlah PKM yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa | 100 | - | |
| | Pembinaan Kesehatan Tradisional | Dinkes | Cakupan pelayanan masyarakat dlm upaya kesehatan tradisional di PKM (akupunktur dan ramuan) | 75 | 46.000.000 | Pembinaan Kesehatan Tradisional | | Cakupan pelayanan masyarakat dlm upaya kesehatan tradisional di PKM (akupunktur dan ramuan) | 75 | 46.000.000 | |
| | Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta | | | | - | Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta | Dinkes | | | - | |
| | Penyediaan Biaya Operasional / Pemeliharaan RS | Dinkes | Jumlah RS yang mendapat biaya Operasional | 100 | 9.000.000.000 | Penyediaan Biaya Operasional / Pemeliharaan RS | Dinkes | Jumlah RS yang mendapat biaya Operasional | 100 | 9.789.280.000 | |
| | Upaya Pelayanan Perawatan Kesmas | Dinkes | | | 13.377.000 | Upaya Pelayanan Perawatan Kesmas | | | | 13.377.000 | |
| | Monitoring Pemucuan Pengembangan Jamban Metode CLTS | Dinkes | Jumlah Desa ODF | 90 | | Monitoring Pemucuan Pengembangan Jamban Metode CLTS | | Jumlah Desa ODF | 90 | | |
| | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | - | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Dinkes | | | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-----|----------------|--|-----------|--|-----|----------------|--|
| | Koordinasi Penilaian Kota Sehat | Dinkes | Cakupan pelaksanaan kegiatan forum kecamatan dan Pokja Desa Sehat | 100 | - | Koordinasi Penilaian Kota Sehat | | Cakupan pelaksanaan kegiatan forum kecamatan dan Pokja Desa Sehat | 100 | - | |
| | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kab.Sehat | | | | - | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kab.Sehat | | | | - | |
| | Program Pengawasan Obat dan Makanan | | | | 17.000.000 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Dinkes | | | 17.000.000 | |
| | Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ masyarakat Di Bidang Obat Dan Makanan | Dinkes | Jumlah saranan yang mendapat bintek dibidang obat, makanan dan minuman | 100 | 17.000.000 | Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ masyarakat Di Bidang Obat Dan Makanan | | Jumlah saranan yang mendapat bintek dibidang obat, makanan dan minuman | 100 | 17.000.000 | |
| | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | 0 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Dinkes | | | 0 | |
| | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | Dinkes | Prosentase pelaksanaan monev terhadap aset daerah di PKM dan ketersediaan data aset daerah | 100 | 0 | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | | Prosentase pelaksanaan monev terhadap aset daerah di PKM dan ketersediaan data aset daerah | 100 | 0 | |
| | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | 31.803.000.000 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | 31.823.000.000 | |
| | Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat | Puskesmas | Jumlah Media Promosi dan Informasi Kesehatan yang tersedia | 100 | 100.000.000 | Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat | Puskesmas | Jumlah Media Promosi dan Informasi Kesehatan yang tersedia | 100 | 100.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-----|-------------|--|-----------|--|-----|-------------|--|
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes | Cakupan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program promkes dan pemberdayaan masyarakat | 100 | - | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | Cakupan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program promkes dan pemberdayaan masyarakat | 100 | - | |
| | Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat | | | | - | Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat | Dinkes | | | - | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | Dinkes | Jumlah Dokumen perencanaan DAK nin fisik yang tersusun | 100 | 207.000.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | PKM | Jumlah Dokumen perencanaan DAK nin fisik yang tersusun | 100 | 207.000.000 | |
| | Pembinaan UKSil,Dokcil Kader Kesehatan Remaja , Sekolah Sehat, | Puskesmas | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lomba Doketr Cilik | 100 | - | Pembinaan UKSil,Dokcil Kader Kesehatan Remaja , Sekolah Sehat, | Puskesmas | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lomba Doketr Cilik | 100 | 20.000.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Kec. Ajangale | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 828.290.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Kec. Ajangale | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 828.290.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Awaru | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 687.548.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Awaru | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 687.548.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Bajoe | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 850.217.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Bajoe | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 850.217.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Bakunge | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 598.660.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Bakunge | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 598.660.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|----|---------------|---|-----|--|----|---------------|--|
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Barebbo | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 766.460.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Barebbo | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 766.460.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Biru | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 949.304.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Biru | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 949.304.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Bontocani | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.246.140.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Bontocani | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.246.140.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Cenrana | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.064.518.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Cenrana | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.064.518.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Cina | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.034.150.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Cina | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.034.150.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Dua Boccoe | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 802.798.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Dua Boccoe | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 802.798.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Gaya Baru | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.294.411.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Gaya Baru | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.294.411.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Kading | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 567.555.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Kading | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 567.555.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|----|---------------|---|-----|--|----|---------------|--|
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Kahu | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 898.691.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Kahu | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 898.691.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Kajuara | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.193.060.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Kajuara | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.193.060.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Koppe | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 910.904.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Koppe | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 910.904.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Lamuru | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.091.070.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Lamuru | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.091.070.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Lamurukung | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 642.140.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Lamurukung | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 642.140.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Lappariaja | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 840.998.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Lappariaja | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 840.998.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Libureng | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 994.205.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Libureng | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 994.205.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Lonrong | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 660.564.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Lonrong | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 660.564.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|----|---------------|--|-----|--|----|---------------|--|
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Mare | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.046.110.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Mare | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.046.110.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Pacing | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 628.595.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Pacing | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 628.595.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Palakka | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 602.990.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Palakka | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 602.990.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Palakka Kahu | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 713.683.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Palakka Kahu | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 713.683.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Patimpeng | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 731.350.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Patimpeng | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 731.350.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Pattiro Mampu | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 846.023.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Pattiro Mampu | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 846.023.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Salomekko | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 679.010.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Salomekko | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 679.010.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Sibulue | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 945.023.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Sibulue | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 945.023.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|----|---------------|--|-----|--|----|---------------|--|
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Sumaling | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 518.240.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Sumaling | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 518.240.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Tana Batue | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 685.583.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Tana Batue | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 685.583.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Taretta | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.034.946.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Taretta | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 1.034.946.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Tellu Siattinge | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 818.884.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Tellu Siattinge | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 818.884.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Timurung | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 419.194.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Timurung | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 419.194.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Tonra | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 887.659.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Tonra | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 887.659.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Tunreng Tellu | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 530.672.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Tunreng Tellu | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 530.672.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Ulaweng | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 971.791.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Ulaweng | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 971.791.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-----|--------------------|--|-----------|--|-----|--------------------|--|
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Usa | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 654.654.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Usa | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 654.654.000 | |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Watampone | PKM | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 859.910.000 | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Wilayah Puskesmas Watampone | | Jumlah desa/kelurahan sasaran kegiatan | 90 | 859.910.000 | |
| | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | 802.815.000 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | 802.815.000 | |
| | Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin | | | | 0 | Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin | | | | 0 | |
| | Penanggulangan Kurang Energi Protein (kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (gaky), Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya | Puskesmas | Jumlah PKM yang melaksanakan program penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Zt Gizi Mikro lainnya | 80 | 17.575.000 | Penanggulangan Kurang Energi Protein (kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (gaky), Kurang Vitamin A Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya | Puskesmas | Jumlah PKM yang melaksanakan program penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan Zt Gizi Mikro lainnya | 100 | 17.575.000 | |
| | Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi | | | | - | Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi | | | | - | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolah Program Gizi | | | | - | Peningkatan Kapasitas Pengelolah Program Gizi | Dinkes | | | - | |
| | Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Program Gizi | Dinkes | Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga pelaksanaan Gizi (TPG) di PKM | 100 | 35.240.000 | Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Program Gizi | Dinkes | Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga pelaksanaan Gizi (TPG) di PKM | 100 | 35.240.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|-----|-------------|--|---------|---|-----|-------------|--|
| | Supervisi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes | Jumlah Monitoring Pelaksanaan Stunting di Wilayah Lokus | 80 | 750.000.000 | Supervisi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes | Jumlah Monitoring Pelaksanaan Stunting di Wilayah Lokus | 100 | 750.000.000 | |
| | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | 721.643.000 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | 736.643.000 | |
| | Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat | Dinkes | Jumlah Penyuluhan TTU, TPM dan TPU terhadap masyarakat | 90 | 40.800.000 | Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat | Dinkes | Jumlah Penyuluhan TTU, TPM dan TPU terhadap masyarakat | 100 | 40.800.000 | |
| | Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat | Dinkes | Terlaksananya kegiatan musyawarah forum kabupaten / kota sehat se pro sulse | 90 | 0 | Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat | Lab Air | Terlaksananya kegiatan musyawarah forum kabupaten / kota sehat se pro sulse | 90 | 0 | |
| | Operasional Laboratorium Pemeriksaan Kualitas air dan lingkungan | Lab Air | Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan pengujian sampel air | 100 | 374.843.000 | Operasional Laboratorium Pemeriksaan Kualitas air dan lingkungan | Dinkes | Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan pengujian sampel air | 100 | 389.843.000 | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes | Cakupan pemantauan, evaluasi dan pelaporan | 100 | 206.000.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes | Cakupan pemantauan, evaluasi dan pelaporan | 100 | 206.000.000 | |
| | Penyelenggaraan Kabupaten Sehat | Dinkes | Cakupan pelaksanaan verifikasi atau penilaian dan frekuensi pelaksanaan pertemuan KKS | 90 | 100.000.000 | Penyelenggaraan Kabupaten Sehat | | Cakupan pelaksanaan verifikasi atau penilaian dan frekuensi pelaksanaan pertemuan KKS | 100 | 100.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|-----|-------------|---|--------|---|-----|-------------|--|
| | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | | | 508.866.000 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Dinkes | | | 548.866.000 | |
| | Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk | Dinkes | Presentase penanganan kasus DBD dan penanganan di Lokasi Kejadian (Fogging) dan Abatesasi | 100 | 57.866.000 | Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk | | Presentase penanganan kasus DBD dan penanganan di Lokasi Kejadian (Fogging) dan Abatesasi | 100 | 57.866.000 | |
| | Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah | | | | 0 | Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah | Dinkes | | | 0 | |
| | Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular | Dinkes | Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | 100 | 221.000.000 | Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular | Dinkes | Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | 100 | 241.000.000 | |
| | Peningkatan Imunisasi | Dinkes | Prosentase desa UCI disetiap PKM | 90 | - | Peningkatan Imunisasi | Dinkes | Prosentase desa UCI disetiap PKM | 90 | - | |
| | Peningkatan Surveillance Epideminologi Dan Penaggulangan Wabah | Dinkes | Prosentase pelaksanaan sistem kewaspadaan dini dan respon KLB < 24 Jam | 90 | 230.000.000 | Peningkatan Surveillance Epideminologi Dan Penaggulangan Wabah | Dinkes | Prosentase pelaksanaan sistem kewaspadaan dini dan respon KLB < 24 Jam | 100 | 250.000.000 | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes | Prosentase ketepatan dan kelengkapan laporan | 100 | 0 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | Prosentase ketepatan dan kelengkapan laporan | 100 | 0 | |
| | Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (kie) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | | | | 0 | Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (kie) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|-----|----------------|---|--------|---|-----|----------------|--|
| | Pelayanan Vaksinasi VAR (Rabies) | | | | 0 | Pelayanan Vaksinasi VAR (Rabies) | | | | 0 | |
| | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | 2.676.730.000 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Dinkes | | | 2.676.730.000 | |
| | Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan | Dinkes | Prosentase ketersediaan dana operasional pendukung pelaksanaan tahapan akreditasi PKM | 100 | 2.618.650.000 | Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan | Dinkes | Prosentase ketersediaan dana operasional pendukung pelaksanaan tahapan akreditasi PKM | 100 | 2.618.650.000 | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes | Jumlah Penalksanaan Monev Fisitasi Kesehatan Swasta | 100 | 58.080.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 100 | Jumlah Penalksanaan Monev Fisitasi Kesehatan Swasta | 100 | 58.080.000 | |
| | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | | | | 24.000.000 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Dinkes | | | 24.000.000 | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes | Prosentase ketersediaan data dan informasi tentang penduduk miskin | 100 | 24.000.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | Prosentase ketersediaan data dan informasi tentang penduduk miskin | 100 | 24.000.000 | |
| | Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | | | | 16.140.937.000 | Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | | | | 16.764.796.672 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|-----|----------------------|--|--------------------------------|---|-----|--------------------------|--|
| | Pembangunan Puskesmas | Kec. Dua Boccoe dan Kec. Bengo | Jumlah Puskesmas yang terbangun | 100 | 3.036.999.000 | Pembangunan Puskesmas | Kec. Dua Boccoe dan Kec. Bengo | Jumlah Puskesmas yang terbangun | 100 | 3.172.200.000 | |
| | Pembangunan Posyandu | Dinkes | | | | Pembangunan Posyandu | Dinkes | | | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas | Dinkes | Jumlah paket sarana dan prasarana PKM yang diadakan | 100 | 12.561.388.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas | Dinkes | Jumlah paket sarana dan prasarana PKM yang diadakan | 100 | 13.050.046.672 | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu | Dinkes | Jumlah PUSTU yang direhabilitasi | 50 | 447.000.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu | Dinkes | Jumlah PUSTU yang direhabilitasi | 50 | 447.000.000 | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Dinkes | Pelaksanaan forum SKPD Bidang Kesehatan | 100 | 95.550.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | Pelaksanaan forum SKPD Bidang Kesehatan | 100 | 95.550.000 | |
| | Pembangunan Pos Kesehatan Desa | | | | | Pembangunan Pos Kesehatan Desa | | | | | |
| | Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | | | | 6.958.999.000 | Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | RS | | | 1.091.459.432.300 | |
| | Pembangunan Rumah Sakit | RS | Jumlah Sarana dan prasarana RS yang terbangun | 100 | 1.099.500.000 | Pembangunan Rumah Sakit | RS | Jumlah Sarana dan prasarana RS yang terbangun | 100 | 1.085.159.159.000 | |
| | Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit | RS | Jumlah Alkes dan Otomatis Genset yang tersedia | 90 | 5.859.499.000 | Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit | RS | Jumlah Alkes dan Otomatis Genset yang tersedia | 90 | 6.300.273.300 | |
| | Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit | RS | Jumlah obat dan alkes yang tersedia | 100 | | Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit | RS | Jumlah obat dan alkes yang tersedia | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|-----|-----------------|--|--------|--|-----|-----------------|--|
| | Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain) | RS | Jumlah perlengkapan rumah tangga RS | 100 | | Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain) | RS | Jumlah perlengkapan rumah tangga RS | 100 | | |
| | Pembangunan Rumah Sakit (DBH-CHT) | RS | Jumlah / Jenis sarana dan prasarana RS yg disediakan | 100 | | Pembangunan Rumah Sakit (DBH-CHT) | | Jumlah / Jenis sarana dan prasarana RS yg disediakan | 100 | | |
| | Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (RSUD Pancaitana) | | | | | Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (RSUD Pancaitana) | | | | | |
| | Penambahan Ruang Rawat Inap RS (vvip, Vip, Kelas I, II, III) | | | | | Penambahan Ruang Rawat Inap RS (vvip, Vip, Kelas I, II, III) | | | | | |
| | Penyusunan Perda Rumah Sakit | | | | | Penyusunan Perda Rumah Sakit | | | | | |
| | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | | 112.215.626.500 | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Dinkes | | | 126.139.760.044 | |
| | Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat | Dinkes | Tersedianya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pola jaminan pemeliharaan kesehatan | 90 | 112.215.626.500 | Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat | | Tersedianya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pola jaminan pemeliharaan kesehatan | 90 | 126.139.760.044 | |
| | Kemitraan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat | | | | 0 | Kemitraan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|-----|---------------|--|---------|--|-----|---------------|--|
| | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | | | | 0 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | | | | 0 | |
| | Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita | | | | 0 | Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita | | | | 0 | |
| | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | | | | 5.000.000 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | | | | 5.000.000 | |
| | Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan | | | | 0 | Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan | Dinkes | | | 0 | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pembinaan Lansia | Dinkes | Cakupan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pembinaan lansia | 100 | 5.000.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pembinaan Lansia | | Cakupan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pembinaan lansia | 100 | 5.000.000 | |
| | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | | | | 13.750.000 | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Farmasi | | | 13.750.000 | |
| | Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri | Farmasi | Prosentase pelaksanaan pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri | 100 | 13.750.000 | Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri | | Prosentase pelaksanaan pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri | 100 | 13.750.000 | |
| | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | | | | 5.374.210.000 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | PKM | | | 5.374.210.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|-----|---------------|--|--------|--|-----|---------------|--|
| | Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan | PKM | Prosentase Akses pelayanan kesehatan bagi bumil, bulin, bufas dan bayi baru lahir | 90 | 5.126.000.000 | Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan | Dinkes | Prosentase Akses pelayanan kesehatan bagi bumil, bulin, bufas dan bayi baru lahir | 90 | 5.126.000.000 | |
| | Pelaksanaan Audit Maternal Prenatal (AMP) Tingkat Kabupaten | Dinkes | Cakupan pelaksanaan audit maternal perinatal (AMP) tingkat Kabupaten | 100 | 41.210.000 | Pelaksanaan Audit Maternal Prenatal (AMP) Tingkat Kabupaten | | Cakupan pelaksanaan audit maternal perinatal (AMP) tingkat Kabupaten | 100 | 41.210.000 | |
| | Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (Utang) | | | | | Pelayanan Secara Berkala bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (Utang) | | | | | |
| | Supervisi Monitoring, Evaluasi Program KIA | Dinkes | Cakupan Pelaksanaan Supervisi, Monitoring dan Pelaporan Program Kesehatan Ibu dan Anak | 100 | 207.000.000 | Supervisi Monitoring, Evaluasi Program KIA | Dinkes | Cakupan Pelaksanaan Supervisi, Monitoring dan Pelaporan Program Kesehatan Ibu dan Anak | 100 | 207.000.000 | |
| | Program Pelayanan Kesehatan Gratis | | | | 0 | Program Pelayanan Kesehatan Gratis | | | | 0 | |
| | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Gratis (Utang) | | | | | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Gratis (Utang) | | | | | |
| | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | | | | 66.585.000 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | Dinkes | | | 66.585.000 | |
| | Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM | Dinkes | Jumlah peserta pelatihan posbindu PTM | 80 | 36.770.000 | Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM | Dinkes | Jumlah peserta pelatihan posbindu PTM | 100 | 36.770.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|-----|-------------|--|--------|---|-----|-------------|--|
| | Pelayanan Kesehatan Indra dan Fungsional | Dinkes | Jumlah PKM yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan indera dan fungsional | 100 | 29.815.000 | Pelayanan Kesehatan Indra dan Fungsional | | Jumlah PKM yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan indera dan fungsional | 100 | 29.815.000 | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan P2PTM | Dinkes | Jumlah Puskesmas yang mendapat Monev P2PTM dan Keswa | 100 | 200.000.000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan P2PTM | Dinkes | Jumlah Puskesmas yang mendapat Monev P2PTM dan Keswa | 100 | 200.000.000 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2021. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sebagian besar usulan dari masyarakat untuk pembangunan bidang kesehatan telah dilimpahkan ke SKPD Kesehatan. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musrenbang kecamatan antara lain Rehabilitasi Puskesmas, Rehabilitasi Rumah dinas dan Rehabilitasi gedung kantor Lainnya (Labkesda, Gedung Balai Gigi), Pembangunan baru Puskesmas (register baru dan Existing), penambahan ruangan baru puskesmas (Penambahan Volume Bangunan), pembangunan baru Pustu, Pengadaan Pusling/ambulance Puskesmas, Pengadaan Listrik Pustu / Puskesmas dan Dinas, Pengadaan Alat Kesehatan Pengadaan Kendaraan Roda Dua Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Pengadaan Meubeler Puskesmas /Pustu Pengadaan PC/Laptop Puskesmas Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas dan Rehabilitasi Pustu

Berdasarkan rangkuman usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut, bahwa seluruhnya telah secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan Pengelolaan upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di Puskesmas. Untuk teknis pelaksanaan pada tahun 2021 diperlukan adanya koordinasi yang intensif antara tokoh masyarakat dengan petugas kesehatan di Puskesmas. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut disajikan dalam tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DAFTAR USULAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021

SKPD : 10201 - DINAS KESEHATAN

| KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | USULAN PEKERJAAN | LOKASI | VOLU ME | PAGU | SUMBER | STATUS |
|---------------------------|---------------------|---|-------------------|---------|----------------|----------------------|----------|
| Kecamatan Cenrana | Desa Cekreware | Pembangunan Baru Puskesmas (Register Baru Dan Existing) | Desa Cakkeware | 1 paket | 400.000.000,00 | Musrenbang Desa | DITERIMA |
| Kecamatan Tanete Riattang | Kelurahan Masumpu | Pengadaan Listrik Pustu/Puskesmas Dan Dinas | Kelurahan Masumpu | 1 Paket | 0,00 | Musrenbang Kelurahan | DITERIMA |
| Kecamatan Kajuara | Desa Raja | Pengadaan Mebeuler Puskesmas/Pustu (Pengadaan meubeliur Lemari) | Desa Raja | 1 Paket | 10.000.000,00 | Musrenbang Desa | DITERIMA |
| Kecamatan Ulaweng | Desa Cani Sirenreng | Pengadaan Mebeuler Puskesmas/Pustu (Meja Kerja, Kursi Kerja dan Lemari Arsip PUSTU Desa Cani Sirenreng) | Dusun Malampe | 1 Paket | 100.000.000,00 | Musrenbang Desa | DITERIMA |
| Kecamatan Lappariaja | Desa Tenri Pakkua | Pengadaan Mebeuler Puskesmas/Pustu (Pustu Padang Lampe Kursi Pasien, Lemari Obat, Meja dan Kursi Kerja,Brangkar,matras,Alkes) | Tenri Pakkua | 1 Paket | 10.000.000,00 | Musrenbang Desa | DITERIMA |
| Kecamatan Tellu Siattinge | Desa Lea | Pengadaan Mebeuler Puskesmas/Pustu (PENGADAAN MEBELEUR TEMPAT TIDUR PASIEN DAN LEMARI OBAT) | DESA LEA | 1 PAKET | 10.000.000,00 | Musrenbang Desa | DITERIMA |
| Kecamatan Bengo | Desa Samaenre | Pengadaan Mebeuler Puskesmas/Pustu | Dusun Ulu Tabba | 1 Paket | 10.000.000,00 | Musrenbang Desa | DITERIMA |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---|------------------------------|---------|----------------|----------------------|----------|
| Kecamatan Barebbo | Desa Wollangi | Pengadaan Alat Kesehatan | Dusun Labiaca | 1 Paket | 50.000.000,00 | Musrenbang Desa | TOLAK |
| Kecamatan Barebbo | Kelurahan Apala | Pengadaan Alat Kesehatan | Kelurahan Apala | 1 Paket | 150.000.000,00 | Musrenbang Kelurahan | DITERIMA |
| Kecamatan Ponre | Desa Tellu Boccoe | Pengadaan Alat Kesehatan | Tellu Boccoe | 1 Paket | 30.000.000,00 | Musrenbang Desa | DITERIMA |
| Kecamatan Lappariaja | Desa Pattuku Limpoe | Pengadaan Alat Kesehatan (Timbangan Bayi, Timbangan Dewasa, Bidan Kit, Doopter, Tensimeter, Pemeriksaan GDS, Pengukur Tinggi Badan, Tempat Tidur Pasien.) | Tompong | 1 Paket | 20.000.000,00 | Musrenbang Desa | DITERIMA |
| Kecamatan Bonto Cani | Desa Watang Cani | Pengadaan Alat Kesehatan (Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Watang Cani) | WATANG CANI | 1 PAKET | 350.000.000,00 | Musrenbang Desa | DITERIMA |
| Kecamatan Ulaweng | Kelurahan Cinnong | Pengadaan Pusling/ Ambulance Puskesmas (UPT Kesehatan (PKM) Ulaweng) | Kelurahan Cinnong | 1 Unit | 400.000.000,00 | Musrenbang Kelurahan | DITERIMA |
| Kecamatan Cenrana | Kelurahan Cenrana | Pengadaan Ambulance Puskesmas | Kecamatan Cenrana | 1 unit | 200.000.000,00 | Musrenbang Desa | DITERIMA |
| Kecamatan Ajangale | Kelurahan Pompanua | Pengadaan Pusling/ Ambulance Puskesmas | Kelurahan Pompanua | 1 Paket | 300.000.000,00 | Musrenbang Kelurahan | DITERIMA |
| Kecamatan Ajangale | Desa Timurung | Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah | Desa Timurung | 1 Paket | 500.000.000,00 | Musrenbang Desa | DITERIMA |
| Kecamatan Barebbo | Kelurahan Apala | Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah | Puskesmas Kading dan barebbo | 1 Paket | 500.000.000,00 | Musrenbang Desa | DITERIMA |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Prioritas Pembangunan Kesehatan Nasional pada tahun 2010-2014 difokuskan pada beberapa fokus prioritas, yaitu :

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
5. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
6. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
10. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota dan pedesaan serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat, maka kebijakan pembangunan kesehatan yang ditetapkan, sebagai berikut :

- Meningkatkan sertifikasi puskesmas perawatan dalam rangka meningkatkan kualitas puskesmas perawatan
- Meningkatkan kemitraan Rumah Sakit, Puskesmas dan Forum Desa
- Meningkatkan keahlian/profesionalisme melalui sertifikasi tenaga kesehatan
- Mengembangkan posyandu pratama menjadi utama dan mandiri.
- Mengembangkan desa siaga melalui dana DID (Dana Investasi Desa)

- Meningkatkan Pemberian makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan kalori bayi dan balita
- Meningkatkan penegakkan perda tentang pelarangan penggunaan garam tidak beriodium
- Meningkatkan penggunaan obat generik dan esensial sesuai dengan kebutuhan
- Meningkatkan kerjasama antara masyarakat pengusaha dan Bidang Pengawasan makanan dan obat
- Meningkatkan sanitasi berbasis masyarakat
- Mengembangkan cakupan rumah tangga PHBS
- Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sebagai unsur Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan yang terbaik pada masyarakat, maka Dinas Kesehatan merumuskan visi dan misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bone Periode 2018 - 2023.

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023, Visi dan Misi Kabupaten Bone, adalah :

VISI : “MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”

Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata Pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah / rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah-daerah yang lain yang saling menguntungkan.

Masyarakat Bone Yang Berdaya Saing, dapat diartikan sebagai terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komperatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasionla, bahkan internasional.

Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintah yang baik.

MISI :

Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih.

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah yang berbasis desa dan kawasan pedesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan pengembangan inovasi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone melalui SPM , yaitu :

- 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar Pelayanan Antenatal
- 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4 Pelayanan Kesehatan Balita
- 5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- 6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- 7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
- 10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

- 11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
- 12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Beberapa indikator dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bone, antara lain :

1. *Bergesernya nilai Paradigma Kesehatan dari Kuratif menjadi Preventif dan Promotif.*

Menurut teori Blum bahwa untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan yang optimal, faktor perilaku mempunyai pengaruh lebih besar yaitu sebesar 60%, sehingga gerakan untuk merubah perilaku masyarakat harus ,mulai digalakkan program promosi kesehatan termasuk PHBS dalam upaya menuju pradigma sehat Kuratif menjadi Preventif dan Promotif.

2. *Upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan*

Perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone dikelompokkan cukup cepat dengan perbandingan hasil sensus penduduk tahun 2018 sebanyak 754.894 jiwa , penduduk Bone tumbuh 0,52% dibanding tahun 2017, dengan kepadatan penduduk 166 jiwa/Km² dengan cepatnya pertumbuhan penduduk ini dan upaya peningkatan perekonomian masyarakat memerlukan perhatian penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas pelayanan tersebar 38 UPTD Puskesmas diwilayah kerja 723 Desa/Kel. serta dukungan pemerintah terhadap perbaikan akses jalanan dan mobilitas lainnya.

3. *Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Tahun 2010 - 2018 bahwa di Kabupaten Bone masih terdapat kategori masyarakat miskin sebanyak 309.076 jiwa atau 10,55% penduduk miskin.

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BONE

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bone, 2010-2018

| Tingkat Kemiskinan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Persentase Penduduk Miskin | 14,38 | 12,67 | 12,25 | 11,82 | 13,88 | 13,12 | 13,07 | 12,29 | 12,55 |
| Sisa Pendapatan | 89.123 | 88.979 | 88.104 | 87.841 | 84.411 | 292.582 | 88.842 | 872.586 | 88.678 |

Subskenario Kemiskinan

Tahun: 2018
Kategori: Miskin

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone
Jl. Dr. Wahidin Sudetomo No. 4 Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp (0401) 21054, Fax (0401) 25226, Email: bps771@bps.go.id
Untuk keperluan statistik, data dapat disajikan berbagai cara sesuai kebutuhan. Untuk keperluan lain, data dapat disajikan dengan cara lain sesuai kebutuhan.

Subskenario kemiskinan online dengan mengakses sensus.bps.go.id

Maka sesuai peraturan perundang-undangan maka kelompok masyarakat miskin ini mendapat jaminan pembiayaan kesehatan baik bersumber dari JKN-KIS dan Jamkesmas.

Upaya ini dimaksudkan sebagai upaya mengangkat harkat derajat masyarakat miskin agar terhindar dari masalah kesehatan sebagai pemicu dari kemiskinan mereka serta upaya mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat terpencil. Kegiatan pembiayaan ini tetap diharapkan menumbuhkan upaya kemandirian masyarakat dan keterlibatan layanan pencegahan dan promosi kesehatan.

Kondisi Pada Tahun 2019 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin telah diintegrasikan kedalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat yang meliputi :

JKN / KIS dengan Sumber Dana APBN sebanyak 362.580 jiwa.

JKN / KIS dengan Sumber Dana APBD sebanyak 294.936 jiwa.

4. Kemitraan dengan Swasta dan masyarakat

Program Paradigma sehat merupakan pendukung utama terciptanya kemitraan dan pengembangan layanan kesehatan di masyarakat melalui kegiatan Kabupaten Sehat, Desa/kelurahan Sehat ber-PHBS dan Desa/Kelurahan Siaga Aktif, dimana pihak swasta dan masyarakat telah berperan serta, berpartisipasi aktif dan berkesinambungan dalam mendukung Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bone.

Sejak 1 Januari 2016 Pemerintah Kabupaten Bone Telah Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan membayar premi asuransi ke BPJS Kesehatan sebanyak 362.580 Jiwa Masyarakat miskin dan kurang mampu dengan sumber dana APBD Kabupaten

Bone dan APBD Provinsi Sul-Sel dan sebanyak 294.936 Jiwa dana APBN pada tahun 2019.

3.1 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Kurangnya jumlah SDM Kesehatan (Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Analisis entomologi kesehatan, epidemiologi, dan sanitarian).
2. Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan pada puskesmas dalam penanganan persalinan, deteksi tumbuh kembang anak
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas perawatan)
4. Masih adanya kasus BGM (Balita dibawah Garis Merah) dan
5. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat di bidang kesehatan yang ditandai dengan rendahnya cakupan balita yang ditimbang di Posyandu tiap bulan.
6. Masih Tingginya angka kesakitan penyakit tidak menular (DM, Hipertensi, Jantung, stroke, dan kecelakaan lalulintas)
7. Masih kurangnya penemuan kasus penyakit (TB, dan pneumonia)
8. Belum optimalnya posyandu dalam peningkatan kesehatan berbasis kompetensi

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai unsur Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dapat memberikan yang terbaik pada masyarakat, maka Dinas Kesehatan merumuskan visi dan misi sebagai satu kesatuan dengan rangkaian kebijakan Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bone Periode 2018 - 2023.

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023, Visi dan Misi Kabupaten Bone, adalah :

Visi

Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.

Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata Pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan

mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah-daerah yang lain yang saling menguntungkan.

Masyarakay Bone Yang Berdaya Saing, dapat diartikan sebagai terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komperatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasionla, bahkan internasional.

Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan data kelola pemerintah yang baik.

Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih.

1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah yang berbasis desa dan kawasan pedesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk penegmbangan usaha dan pengembangan inovasi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.
6. Meningkatkan pelayanan politik, peegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone ada beberapa sasaran yang akan di capai di Bidang Kesehatan :

- Meningkatkan jumlah puskesmas perawatan
- Meningkatkan puskesmas perawatan dengan kualitas baik
- Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
- Meningkatkan puskesmas perawatan menjadi rumah sakit tipe D
- Terbangunnya rumah sakit tipe C
- Tersusunnya sistem rujukan yang dipatuhi oleh petugas pelayanan dasar
- Meningkatkan kompetensi bidan dalam melaksanakan penanganan persalinan dan penanganan deteksi dini tumbuh kembang anak
- Meningkatkan kompetensi tim PONED dalam penanganan persalinan
- Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan
- Meningkatkan strata posyandu sebagai usaha kesehatan berbasis masyarakat
- Meningkatkan cakupan desa siaga aktif
- Menurunnya kasus gizi buruk, dan gizi kurang
- Menurunnya GAKY
- Meningkatkan jaminan pemeliharaan bagi masyarakat miskin dan rentan
- Meningkatkan ketersediaan obat generik dan obat non generik
- Menurunnya kasus keracunan makanan pada masyarakat
- Meningkatkan TTU yang memenuhi syarat kesehatan
- Meningkatkan instansi pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan
- Meningkatkan rumah tangga dengan PHBS
- Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular
- Meningkatkan penemuan penyakit TB, Pneumonia, AFP, Kusta, HIV AIDs
- Menurunnya kejadian luar biasa

3.2 Program dan Kegiatan

Tahun 2020 terjadi perubahan Program dan Kegiatan pada seluruh SKPD termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Perubahan Program dan kegiatan ini mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, di mana program dan kegiatan pada tahun sebelumnya berjumlah 20 Program dan 106 kegiatan. Pada Kemendagri Nomor 90 terdapat 5 Program, 14 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel pemetaan di bawah ini

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Menurut Kemendagri 90 Tahun 2019

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

OPD : DINAS KESEHATAN KAB. BONE

| PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA | | | | | | PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | |
|---|----|--------|----------------|---|--|---|--|------------------|--|--|-----------------------------------|
| KODE | | URUSAN | BIDAN G URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM |
| 10 20 1 01 | | | | Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | Cakupan Realisasi Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | | | | | | |
| 10 20 1 01 | 02 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah angsuran pembayaran jasa komunikasi (rekening) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah angsuran pembayaran jasa komunikasi (rekening) | Adminstrasi Umum | Jumlah angsuran pembayaran jasa komunikasi (rekening) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP |
| 10 20 1 01 | 07 | | | Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan | Adminstrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama 1 tahun | Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan | Adminstrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama 1 tahun | | Adminstrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama 1 tahun | | |
| 10 20 1 01 | 08 | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Cleaning service yang mendapat upah bulanan (Orang) | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Cleaning service yang mendapat upah bulanan (Orang) | | Jumlah Cleaning service yang mendapat upah bulanan (Orang) | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|
| 10 20 1 01 | 12 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah ketersediaan Alat/Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah ketersediaan Alat/Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | | Jumlah ketersediaan Alat/Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | | |
| 10 20 1 01 | 15 | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | Jumlah media yg menyediakan majalah/surat kabar sebagai bahan bacaan (media) | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | Jumlah media yg menyediakan majalah/surat kabar sebagai bahan bacaan (media) | | Jumlah media yg menyediakan majalah/surat kabar sebagai bahan bacaan (media) | | |
| 10 20 1 01 | 23 | | | Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah (kegiatan) | Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah (kegiatan) | | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah (kegiatan) | | |
| 10 20 1 01 | 24 | | | Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran | Jumlah Kebutuhan pendukung pelaksanaan adminstrasi perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Kebutuhan pendukung pelaksanaan adminstrasi perkantoran | | Jumlah Kebutuhan pendukung pelaksanaan adminstrasi perkantoran | | |
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | |

| 10 20 1 02 | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan relaisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana aparatur (%) | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|---|---|--|---|--|---|-----------------------------------|
| 10 20 1 02 | 05 | | | Pengadaan Kendaraan / Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia | Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia | Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| 10 20 1 02 | 07 | | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yg diadakan (paket) | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yg diadakan (paket) | Adminstrasi Umum | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yg diadakan (paket) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP |
| 10 20 1 02 | 09 | | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung Kantor (Jenis) | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung Kantor (Jenis) | | Jumlah pengadaan peralatan gedung Kantor (Jenis) | | |
| 10 20 1 02 | 10 | | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah pengadaan mebeleur (Jenis) | Pengadaan Mebeleur | Jumlah pengadaan mebeleur (Jenis) | | Jumlah pengadaan mebeleur (Jenis) | | |
| 10 20 1 02 | 22 | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yg diperbaiki / dipelihara (Unit) | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yg diperbaiki / dipelihara (Unit) | | Jumlah gedung kantor yg diperbaiki / dipelihara (Unit) | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 10 20 1 01 | 24 | | | Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa pemeliharaan dan perizinan (Motor dan Mobil) | Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa pemeliharaan dan perizinan (Motor dan Mobil) | | Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa pemeliharaan dan perizinan (Motor dan Mobil) | | |
| 10 20 1 02 | 28 | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan yang mendapat biaya pemeliharaan (Unit) | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan yang mendapat biaya pemeliharaan (Unit) | | Jumlah peralatan yang mendapat biaya pemeliharaan (Unit) | | |
| 10 20 1 02 | 45 | | | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | Jumlah Puskesmas, Rumdis dan Gedung Kantor Lainnya yang di Rehabilitasi (unit) | Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Puskesmas, Rumdis dan Gedung Kantor Lainnya yang di Rehabilitasi (unit) | Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Puskesmas, Rumdis dan Gedung Kantor Lainnya yang di Rehabilitasi (unit) | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP |
| | | | | | | Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | |
| | | | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | |
| 10 20 1 03 | | | | Program peningkatan Disiplin Aparatur | Cakupan Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------------------|
| 10 20 1 03 | 01 | | | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah Pengadaan mesin absensi (Buah) | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah Pengadaan mesin absensi (Buah) | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Pengadaan mesin absensi (Buah) | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP |
| | | | | Pengadaan Pakain Korpri | Jumlah Pakaian Korpri yang diadakan (Lembar) | Pengadaan Pakain Korpri | Jumlah Pakaian Korpri yang diadakan (Lembar) | | Jumlah Pakaian Korpri yang diadakan (Lembar) | | |
| | | | | Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Pasang) | Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Pasang) | | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Pasang) | | |
| 10 20 1 05 | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%) | | | | | | |
| 10 20 1 05 | 01 | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklatpim dan Bimbingan teknis lainnya (Org) | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklatpim dan Bimbingan teknis lainnya (Org) | | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklatpim dan Bimbingan teknis lainnya (Org) | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP |
| 10 20 1 05 | 03 | | | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat | | Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---------------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|
| 10 20 1 05 | 22 | | | Peningkatan Sumber Daya Manusia | Jumlah Aplikasi SDMK yang digunakan (jenis) | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kerja Kabupaten / Kota | | | |
| | | | | | | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan | | | | | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Aplikasi SDMK yang digunakan (jenis) | | Jumlah Aplikasi SDMK yang digunakan (jenis) | | PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
| | | | | | | Distribusi dan pemerataan Sumber Daya Manusia | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagun aan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia diwilayah Kabupaten / Kota | | | |
| | | | | | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|
| | | | | | | Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | |
| | | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten /Kota | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | |
| 10 20 1 05 | 24 | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah Monev Puskesmas yang mendapat Dana BOK dan dievaluasi tiap tahun | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks keluarga Sehat |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar | | | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | |
| | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Militus | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|---|---|--|---|----------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkolosis | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | | | | | |
| | | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | |
| 10 20 1 05 | 27 | | | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional | Jumlah pegawai yang menjadi Tim Penilai dan Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (Org) | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pegawai yang menjadi Tim Penilai dan Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (Org) | Adminstrasi Keuangan | Jumlah pegawai yang menjadi Tim Penilai dan Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (Org) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP |
| | | | | | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------------------|
| 10 20 1 06 | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Cakupan relaisasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%) | | | | | | |
| 10 20 1 06 | 01 | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (Dokumen) | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (Dokumen) | Adminstrasi Keuangan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (Dokumen) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP |
| | | | | Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun | Adminstrasi Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun | | |
| | | | | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra) | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra) | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra) | | |
| | | | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------------------|
| | | | | Program Penunjang Pemerintahan Umum | Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Kegiatan Umum | | | | | | |
| | | | | Penyusunan rencana Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencana dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun (Dokumen) | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencana dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun (Dokumen) | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencana dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun (Dokumen) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP |
| | | | | Pengelolaan Website Perangkat Daerah | Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan Website (Kegiatan) | Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet | Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan Website (Kegiatan) | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi | Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan Website (Kegiatan) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP |
| | | | | Promosi dan Pameran Pembangunan | Jumlah Pameran yang diikuti / dilaksanakan (Kegiatan) | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Pameran yang diikuti / dilaksanakan (Kegiatan) | Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pameran yang diikuti / dilaksanakan (Kegiatan) | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP |
| 10 20 1 15 | | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Cakupan Realisasi Ketersediaan Obat | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------|
| 10 20 1 15 | 01 | | | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Jumlah RS, PKM dan PUSTU yang mendapat pasokan obat | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah RS, PKM dan PUSTU yang mendapat pasokan obat | Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah RS, PKM dan PUSTU yang mendapat pasokan obat | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat |
| | | | | | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | | | | | |
| 10 20 1 15 | 05 | | | Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Jumlah Pengelola Obat di RS, PKM dan PUSTU dan yang mendapat pembinaan pengelolaan obat | Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Pengelola Obat di RS, PKM dan PUSTU dan yang mendapat pembinaan pengelolaan obat | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Indeks keluarga Sehat |
| 10 20 1 15 | 06 | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah RS dan PKM yang di monev | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah RS dan PKM yang di monev | Penerbitan Izin RS Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah RS dan PKM yang di monev | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| 10 20 1 16 | | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 10 20 1 16 | 07 | | | Pelayanan Kefarmasin dan peralatan kesehatan | Jumlah pelaksanaan Monev dan Kalibrasi alat kesehatan | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah pelaksanaan Monev dan Kalibrasi alat kesehatan | Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah pelaksanaan Monev dan Kalibrasi alat kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Persentasi Fasilitas Kesehatan terakredita si |
| 10 20 1 16 | 09 | | | Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Jumlah PKM yang mendapatkan Dana BOK dan Jampersal | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah PKM yang mendapatkan Dana BOK dan Jampersal | Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah PKM yang mendapatkan Dana BOK dan Jampersal | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Indeks keluarga Sehat |
| 10 20 1 16 | 11 | | | Peningkatan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana | Jumlah Lokasi yang mendapat penanganan Korban Bencana | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana | Jumlah Lokasi yang mendapat penanganan Korban Bencana | Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Lokasi yang mendapat penanganan Korban Bencana | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Indeks Keluarga Sehat |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | | Pegelolaan Upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan | | | | | |
| 10 20 16 | 13 | | | Pemeliharaan dan pengembangan fasilitas puskesmas | Jumlah Operasional PKM yang mendapatkan biaya operasional / pemeliharaan UPT | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Operasional PKM yang mendapatkan biaya operasional / pemeliharaan UPT | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Operasional PKM yang mendapatkan biaya operasional / pemeliharaan UPT | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentasi Fasilitas Kesehatan terakreditasi |
| 10 20 16 | 14 | | | Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan | Jumlah Desa Yang difasilitasi pemicuan pembangunan jamban dan perilaku hidup sehat (Desa) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Desa Yang difasilitasi pemicuan pembangunan jamban dan perilaku hidup sehat (Desa) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Desa Yang difasilitasi pemicuan pembangunan jamban dan perilaku hidup sehat (Desa) | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Desa / Kelurahan Sehat |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|---|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 10 20 1 16 | 15 | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah PKM yang mendapat monev | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya kesehatan (UKBM) | Jumlah PKM yang mendapat monev | Pengembang an dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yang mendapat monev | PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T BIDANG KESEHATAN | Indeks keluarga Sehat |
| 10 20 1 16 | 16 | | | Peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat pada pusat-pusat rujukan dan instalasi medis | Jumlah sarana kesehatan rujukan yang mendapat izin operasional | Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D | Jumlah sarana kesehatan rujukan yang mendapat izin operasional | Penerbitan Izin RS Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Indeks keluarga Sehat |
| | | | | | | Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|---|---|---|--|---|--|------------------------------------|
| 10 20 1 16 | 23 | | | Penyediaan Biaya Operasional / Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Operasional RS yang mendapat biaya operasional | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Operasional RS yang mendapat biaya operasional | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Operasional RS yang mendapat biaya operasional | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Presentasi Fasilitas Terakreditasi |
| 10 20 1 16 | 35 | | | Pembinaan Kesehatan Tradisional | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Tradisional | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Tradisional | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Tradisional | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat |
| 10 20 1 16 | 39 | | | Upaya Pelauanana Perawatan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Kunjungan Keluarga Terbina | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Kunjungan Keluarga Terbina | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Kunjungan Keluarga Terbina | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| 10 20 1 17 | | | | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Cakupan pengawasan obat dan makanan | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|---|--|---|---|---|--|-----------------------------|
| 10 20 1 17 | 01 | | | Peningkatan Pemberdayaan konsumen masyarakat dibidang obat dan makanan | Jumlah sarana yang mendapat bimtek dibidang obat, makanan dan minuman | Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional | Jumlah sarana yang mendapat bimtek dibidang obat, makanan dan minuman | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah sarana yang mendapat bimtek dibidang obat, makanan dan minuman | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Indeks keluarga Sehat |
| | | | | | | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jaminan dan sentra makanan jajanan | | Penerbitan stiket pembinaan pada makanan jajanan sentra makanan | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|--|---|--|---|--|--|-----------------------|
| 10 20 1 19 | | | | Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | Cakupan pelaksanaan Monev dan pelaporan program promkes dan pemberdayaan masyarakat | | | | | | |
| 10 20 1 19 | 01 | | | Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat | Jumlah Media promosi dan informasi kesehatan yang tersedia | Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Media promosi dan informasi kesehatan yang tersedia | Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Media promosi dan informasi kesehatan yang tersedia | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Indeks keluarga Sehat |
| 10 20 1 19 | 05 | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah PKM sasaran Monev | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya kesehatan (UKBM) | Jumlah PKM sasaran Monev | Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM sasaran Monev | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------|
| 10 20 1 19 | 06 | | | Peningkatan Upaya bersumber daya masyarakat | Jumlah UKBM yang dibina | Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah UKBM yang dibina | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah UKBM yang dibina | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Indeks Keluarga Sehat |
| | | | | | | Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat | | Advokasi, pemberdaya an, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten / Kota | | PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T BIDANG KESEHATAN | |
| | | | | | | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya kesehatan (UKBM) | | Pengembang an dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten / Kota | | | |

| 10 20 1 19 | 05 - 60 | | | Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (38 PKM) | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Indeks keluarga Sehat |
|---------------|------------|--|--|--|---|--|---|---|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis | | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | | | | | | |
| | | | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | |

| 10 20 1 20 | | | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Cakupan Pelaksanaan Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|---|---|---|--|---|--|------------------------------|
| 10 20 1 20 | 02 | | | Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin | Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan (Paket) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan (Paket) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan (Paket) | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prosentase Balita Gizi Buruk |
| 10 20 1 20 | 03 | | | Penanggulangan Kurang nergy Protein (KEP), Anemia Gizi besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan Zat Gizi Mikro Lainnya | Jumlah PKM yang melaksanakan program penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, KVA dan Zat Gizi mikro lainnya (Paket) | | Jumlah PKM yang melaksanakan program penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, KVA dan Zat Gizi mikro lainnya (Paket) | | Jumlah PKM yang melaksanakan program penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, KVA dan Zat Gizi mikro lainnya (Paket) | | |
| 10 20 1 20 | 04 | | | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi | Jumlah pemantauan terhadap PKM terhadap pelaksanaan KADARZI | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah pemantauan terhadap PKM terhadap pelaksanaan KADARZI | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah pemantauan terhadap PKM terhadap pelaksanaan KADARZI | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prosentase Balita Gizi Buruk |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|--|---|--|--|--|---|------------------------------|
| 10 20 1 20 | 11 | | | Pembinaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Program Gizi | Jumlah tenaga yang mengikuti Bimtek program Gizi (Kegiatan) | Penyelenggaraan Pelatihan untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah tenaga yang mengikuti Bimtek program Gizi (Kegiatan) | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabaten / Kota | Jumlah tenaga yang mengikuti Bimtek program Gizi (Kegiatan) | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Gizi Buruk |
| 10 20 1 20 | 16 | | | Supervisi, Monitoring dan Pelaporan | Jumlah PKM yang mendapat supervisi dan monev program gizi (Kegiatan) | Pengelolaan pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah PKM yang mendapat supervisi dan monev program gizi (Kegiatan) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yang mendapat supervisi dan monev program gizi (Kegiatan) | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Gizi Buruk |
| 10 20 1 20 | 16 | | | Supervisi, Monitoring dan Pelaporan | Jumlah Monitoring pelaksanaan stunting di wilayah Locus (Kegiatan) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Monitoring pelaksanaan stunting di wilayah Locus (Kegiatan) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Monitoring pelaksanaan stunting di wilayah Locus (Kegiatan) | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prosentase Balita Gizi Buruk |
| 10 20 1 20 | 17 | | | Pencegahan dan penanggulangan Stunting | Jumlah Monitoring pelaksanaan stunting di wilayah Locus (Kegiatan) | | Jumlah Monitoring pelaksanaan stunting di wilayah Locus (Kegiatan) | | Jumlah Monitoring pelaksanaan stunting di wilayah Locus (Kegiatan) | | |

| 10 20 1 21 | | | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Cakupan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan lingkungan sehat | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|---|--|---|---|---|---|--------------------------------|
| 10 20 1 21 | 02 | | | Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat | Jumlah penyuluhan TTU, TPM dan TPU terhadap masyarakat (Kegiatan) | Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan sertifikat Laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot Air Minum (DAM) | Jumlah penyuluhan TTU, TPM dan TPU terhadap masyarakat (Kegiatan) | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi tempat pengolahan makana (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Rest oran dan Depot Air Minum | Jumlah penyuluhan TTU, TPM dan TPU terhadap masyarakat (Kegiatan) | PROGRAM SEDIAAN FARMASI , ALAT KESEHATAN DANA MAKANAN MINUMAN | Cakupan Desa / Kelurahan Sehat |
| 10 20 1 21 | 03 | | | Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat | Jumlah Kebijakan yang disosialisasikan | | Jumlah Kebijakan yang disosialisasikan | | Jumlah Kebijakan yang disosialisasikan | | |
| 10 20 1 21 | 04 | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah monev program kesling dan kesjaor | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah monev program kesling dan kesjaor | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah monev program kesling dan kesjaor | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Desa / Kelurahan Sehat |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| 10 20 1 21 | 05 | | | Operasional Laboratorium pemeriksaan kwalitas air dan lingkungan | Jumlah pemeriksaan kualitas Damiu dan Sumber Air Bersih tersedia | Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan | Jumlah pemeriksaan kualitas Damiu dan Sumber Air Bersih tersedia | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi tempat pengolahan | Jumlah pemeriksaan kualitas Damiu dan Sumber Air Bersih tersedia | | Cakupan Desa / Kelurahan Sehat |
| 10 20 1 21 | 05 | | | Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Laboratorium Kesehatan Daerah | Jumlah pemeriksaan kualitas Damiu dan Sumber Air Bersih tersedia | sertifikat Laik higiene sanitasi tempat tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot Air Minum (DAM) | Jumlah pemeriksaan kualitas Damiu dan Sumber Air Bersih tersedia | makana (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Rest oran dan Depot Air Minum | Jumlah pemeriksaan kualitas Damiu dan Sumber Air Bersih tersedia | | |
| 10 20 1 21 | 06 | | | Penyelenggaraan Kabupaten Sehat | Jumlah Dokumen Laporan penyelenggaraan KKS tersedia (Dokumen) | Penyelenggaraan Kabupaten Sehat | Jumlah Dokumen Laporan penyelenggaraan KKS tersedia (Dokumen) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Laporan penyelenggaraan KKS tersedia (Dokumen) | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Cakupan Desa / Kelurahan Sehat |
| 10 20 1 22 | | | | Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular | Cakupan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | | | | | | |
| 10 20 1 22 | 01 | | | Penyemprotan / Fogging sarang nyamuk | Jumlah kegiatan pelaksanaan (Fooging) dilokasi kejadian DBD | Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah kegiatan pelaksanaan (Fooging) dilokasi kejadian DBD | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat | Jumlah kegiatan pelaksanaan (Fooging) dilokasi kejadian DBD | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA | Cakupan penemuan dan penagnana n penyakit DBD |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Daerah Kabupaten / Kota | | KESEHATAN MASYARAKA T | |
| 10 20 1 22 | 04 | | | Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah | Jumlah Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak sekolah | Pengelolaan Pelayanan Balita | Jumlah Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak sekolah | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak sekolah | | Angka Kematian Balita |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | |
| 10 20 1 22 | 05 | | | Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Jumlah pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Indeks Keluarga Sehat |
| 10 20 1 22 | 08 | | | Peningkatan Imunisasi | Jumlah Bayi, Balita yang di imunisasi | Pengelolaan Pelayanan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi, Balita yang di imunisasi | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Bayi, Balita yang di imunisasi | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Angka kematian Bayi dan Balita |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Balita | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|--|--|--|---|--|---|-----------------------------|
| 10 20 1 22 | 09 | | | Peningkatan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah | Jumlah kegiatan pelaksanaan surveillance epidemiologi | Pengelolaan Surveillance Kesehatan | Jumlah kegiatan pelaksanaan surveillance epidemiologi | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah kegiatan pelaksanaan surveillance epidemiologi | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Indeks Keluarga Sehat |
| | | | | | | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | |
| 10 20 1 22 | 10 | | | Peningkatan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit | Jumlah PKM yang melaksanakan program P2 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah PKM yang melaksanakan program P2 | Penyelengga raan Sistem informasi secara terintegrasi | Jumlah PKM yang melaksanakan program P2 | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Indeks Keluarga Sehat |
| 10 20 1 22 | 11 | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah PKM yg di monev | Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah PKM yg di monev | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yg di monev | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Indeks Keluarga Sehat |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
| 10 20 1 22 | 12 | | | Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (DBD) | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus DBD | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus DBD | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus DBD | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Cakupan penemuan dan penagnana n penyakit DBD |
| 10 20 1 22 | 13 | | | Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Malaria) | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus Malaria | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus Malaria | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus Malaria | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Angka kejadian malaria (per 1000 penduduk) |
| 10 20 1 22 | 14 | | | Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS) | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus HIV / AIDS | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus HIV / AIDS | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus HIV / AIDS | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Prevalensi HIV/AIDS (per 1000 penduduk) |
| | | | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV | | | | | |
| 10 20 1 23 | | | | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Cakupan sarana / fasilitas kesehatan yang terakreditasi | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|---|--|---|--|---|---|------------------------------------|
| 10 20 1 23 | 01 | | | Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan | Jumlah PKM terakreditasi / re akreditasi | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota | Cakupan sarana / fasilitas kesehatan yang terakreditasi | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Cakupan sarana / fasilitas kesehatan yang terakreditasi | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Presentasi Fasilitas Terakreditasi |
| 10 20 1 23 | 06 | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah pelaksanaan Monev fasilitas kesehatan swsta | Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah pelaksanaan Monev fasilitas kesehatan swsta | Penerbitan Izin RS kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota | Jumlah pelaksanaan Monev fasilitas kesehatan swsta | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Presentasi Fasilitas Terakreditasi |
| 10 20 1 24 | | | | Program pelayanan Masyarakat Miskin | Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin | | | | | | |
| 10 20 1 24 | 10 | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah pelaksanaan kegiatan binaan program penanggulangan kemiskinan daerah | Pengelolaan pelayanan Kesehatan Khusus | Jumlah pelaksanaan kegiatan binaan program penanggulangan kemiskinan daerah | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah pelaksanaan kegiatan binaan program penanggulangan kemiskinan daerah | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|--|--|---|--|---|---|------------------------|
| 10 20 1 25 | | | | Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana PKM/Pustu dan Jaringannya | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di PKM dan Jaringannya | | | | | | |
| 10 20 1 25 | 01 | | | Pembangunan Puskesmas | Jumlah PKM yang terbangun | Pembangunan Puskesmas | Jumlah PKM yang terbangun | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yang terbangun | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan pasien |
| 10 20 1 25 | 02 | | | Pembangunan Puskesmas Pembantu | Jumlah Puskesmas pembantu Yang terbangun | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Puskesmas pembantu Yang terbangun | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Puskesmas pembantu Yang terbangun | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan pasien |
| 10 20 1 25 | 07 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas | Jumlah Paket sarana dan prasarana PKM yang diadakan | Pengadaan Sarana fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Paket sarana dan prasarana PKM yang diadakan | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | Jumlah Paket sarana dan prasarana PKM yang diadakan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN | Indeks Kepuasan pasien |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|---|---|--|---|--|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | | Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan | | Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| 10 20 1 25 | 21 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat PUSTU | Jumlah PUSTU yang akan direhabilitasi | Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya | Jumlah PUSTU yang akan direhabilitasi | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PUSTU yang akan direhabilitasi | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan pasien |
| 10 20 1 25 | 23 | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan | Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP |
| 10 20 1 26 | | | | Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru dan RS Mata | Cakupan ketersediaan alat kesehatan dan sarana penunjang RS | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|--|--|---|--|---|--|------------------------|
| 10 20 1 26 | 01 | | | Pembangunan Rumah Sakit | Jumlah RS yang terbangun | Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan Parasarana pendukungnya | Jumlah RS yang terbangun | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah RS yang terbangun | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan pasien |
| 10 20 1 26 | 18 | | | Pengadaan Alat-Alat RS | Jumlah Alat kesehatan dan yang tersedia | Pengadann alat kesehatan / alata penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Alat kesehatan dan yang tersedia | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Alat kesehatan dan yang tersedia | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan pasien |
| 10 20 1 26 | 19 | | | Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit | Jumlah Obat yang tersedia | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Obat yang tersedia | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Obat yang tersedia | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Indeks Kepuasan pasien |
| | | | | | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | | | | | |
| 10 20 1 28 | | | | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Cakupan PKM yang bekerjasama dengan BPJS | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|---|---|---|--|---|---|-----------------------|
| 10 20 1 28 | 01 | | | Kemitraan Asuransi Kesehatan | Jumlah kegiatan pembayaran tagihan BPJS premi kapitasi dan non kapitasi | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Cakupan PKM yang bekerjasama dengan BPJS | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Cakupan PKM yang bekerjasama dengan BPJS | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat |
| 10 20 1 29 | | | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Cakupan pelayanan kesehatan anak balita | | | | | | |
| 10 20 1 29 | 04 | | | Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak balita | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Angka Kematian Balita |
| | | | | | | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan | | | | | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|--|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| 10 20 1 29 | 07 | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah PKM yang di Monev (Kegiatan) | Pengelolaan pelayanan Kesehatana Balita | Jumlah PKM yang di Monev (Kegiatan) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yang di Monev (Kegiatan) | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Angak kematian Balita |
| 10 20 1 29 | 10 | | | Kegiatan Lomba Balita Sehat | Jumlah Peserta Lomba Balita Sehat | Pengelolaan Pelayanan Balita | Jumlah Peserta Lomba Balita Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Angka Kematian Balita |
| 10 20 1 30 | | | | Program Peningkatan Kesehatan Lansia | Cakupan PKM dengan program Kesehatan Lansia | | | | | | |
| 10 20 1 30 | 01 | | | Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan Lansia | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan Lansia | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan Lansia | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Indeks Keluarga Sehat |
| 10 20 1 30 | 11 | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah Laporan Monev Lansia | | | | | | |

| 10 20 1 31 | | | | Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan | Cakupan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 10 20 1 31 | 01 | | | Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri | Jumlah bimbingan teknis makanan hasil industri | Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga | Jumlah bimbingan teknis makanan hasil industri | Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga | Jumlah bimbingan teknis makanan hasil industri | PROGRAM SEDIAAN FARMASI , ALAT KESEHATAN DANA MAKANAN MINUMAN | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|---|---|--|--|--|--|---|--------------------|
| 10 20 1 32 | | | | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Cakupan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan | | | | | | |
| 10 20 1 32 | 04 | | | Pelayanan Secara berkala bagi ibu hamil dan melahirkan | Jumlah Ibu Hamil dan melahirkan secara berkala | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil dan melahirkan secara berkala | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Ibu Hamil dan melahirkan secara berkala | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Ibu |
| | | | | | | Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | |
| 10 20 1 32 | 06 | | | Orientasi ANC terpadu bagi PKM PONED | Jumlah Peserta Orientasi ANC (Kegiatan) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Peserta Orientasi ANC (Kegiatan) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Peserta Orientasi ANC (Kegiatan) | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka kematian Ibu |
| 10 20 1 32 | 13 | | | Pelaksanaan Uadir Maternal Perinatal (AMP) | Jumlah Peserta AMP | Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Peserta AMP | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Peserta AMP | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka kematian Ibu |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--------------------------|
| 10 20 1 32 | 16 | | | Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) | Jumlah Peserta APN (Orang) | Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan | Jumlah Peserta APN (Orang) | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabaten / Kota | Jumlah Peserta APN (Orang) | PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Angka kematian Ibu |
| | | | | | | Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan | | Pengembang an mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan | | | |
| 10 20 1 32 | 18 | | | Supervisi, Monitoring dan Pelaporan KIA | Jumlah PKM yang di Monev (Kegiatan) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah PKM yang di Monev (Kegiatan) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yang di Monev (Kegiatan) | PROGRAM PEMENUHA N UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T | Angk kematian Bayi |
| | | | | | | Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaa Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | |
| | | | | | | Pengelolaan pelaynanan Kesehatan Balita | | | | | |

| 10 20 1 34 | | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak menular | Cakupan pelaksanaan pemantauan faktor resiko penyakit tidak menular | | | | | | |
|---------------|----|--|--|--|---|---|--|--|--|---|-----------------------|
| 10 20 1 34 | 01 | | | Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM | Jumlah peserta pelatihan Posbindu Penyakit tidak menular | Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah peserta pelatihan Posbindu Penyakit tidak menular | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah peserta pelatihan Posbindu Penyakit tidak menular | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat |
| | | | | | | Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota | | | |
| 10 20 1 34 | 09 | | | Pelayanan Kesehatan Indera dan Fungsional | Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan idera dan fungsional | Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan idera dan fungsional | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan idera dan fungsional | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| 10 20 1 34 | 11 | | | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah PKM yang mendapat Monev P2PTM dan Keswa | Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah PKM yang mendapat Monev P2PTM dan Keswa | | Jumlah PKM yang mendapat Monev P2PTM dan Keswa | | |

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90
TAHUN 2021**

| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|---|--|---|
| PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Adminstrasi Umum | Jumlah angsuran pembayaran jasa komunikasi (rekening) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah angsuran pembayaran jasa komunikasi (rekening) |
| | | | Adminstrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama 1 tahun | Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan | Adminstrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama 1 tahun |
| | | | Jumlah Cleaning service yang mendapatkkan upah bulanan (Orang) | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Cleaning service yang mendapatkkan upah bulanan (Orang) |
| | | | Jumlah ketersediaan Alat/Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah ketersediaan Alat/Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor (Jenis) |
| | | | Jumlah media yg menyediakan majalah/surat kabar sebagai bahan bacaan (media) | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah media yg menyediakan majalah/surat kabar sebagai bahan bacaan (media) |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah (kegiatan) | Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah (kegiatan) |
| | | | Jumlah Kebutuhan pendukung pelaksanaan adminstrasi perkantoran | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah Kebutuhan pendukung pelaksanaan adminstrasi perkantoran |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|---|--|---|
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Adminstrasi Umum | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yg diadakan (paket) | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yg diadakan (paket) |
| | | | Jumlah pengadaan peralatan gedung Kantor (Jenis) | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung Kantor (Jenis) |
| | | | Jumlah pengadaan mebeleur (Jenis) | Pengadaan Mebeleur | Jumlah pengadaan mebeleur (Jenis) |
| | | | Jumlah gedung kantor yg diperbaiki / dipelihara (Unit) | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yg diperbaiki / dipelihara (Unit) |
| | | | Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa pemeliharaan dan perizinan (Motor dan Mobil) | Pemeliharaan Rutin / berkala kendaran Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan jasa pemeliharaan dan perizinan (Motor dan Mobil) |
| | | | Jumlah peralatan yang mendapat biaya pemeliharaan (Unit) | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan yang mendapat biaya pemeliharaan (Unit) |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Adminstrasi Keuangan | Jumlah pegawai yang menjadi Tim Penilai dan Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (Org) | Penyediaan Admistrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pegawai yang menjadi Tim Penilai dan Tim Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (Org) |
| | | | | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Adminstrasi Keuangan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (Dokumen) | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (Dokumen) |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| DAERAH | | Adminstrasi Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran | Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun |
| | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra) | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun (RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra) |
| | | | | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencana dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun (Dokumen) | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencana dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun (Dokumen) |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi | Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan Website (Kegiatan) | Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet | Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan Website (Kegiatan) |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan | Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia | Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Puskesmas, Rumdis dan Gedung Kantor Lainnya yang di Rehabilitasi (unit) | Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Puskesmas, Rumdis dan Gedung Kantor Lainnya yang di Rehabilitasi (unit) |
| | | | | Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | |
| | | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklatpim dan Bimbingan teknis lainnya (Org) | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklatpim dan Bimbingan teknis lainnya (Org) |
| | | | Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Pengadaan mesin absensi (Buah) | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah Pengadaan mesin absensi (Buah) |
| | | | Jumlah Pakaian Korpri yang diadakan (Lembar) | Pengadaan Pakain Korpri | Jumlah Pakaian Korpri yang diadakan (Lembar) |
| | | | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Pasang) | Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Pasang) |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|--|--|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks keluarga Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Militus | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkolosis | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | |
| | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah RS, PKM dan PUSTU yang mendapat pasokan obat | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah RS, PKM dan PUSTU yang mendapat pasokan obat |
| | | | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Penerbitan Izin RS Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah RS dan PKM yang di monev | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah RS dan PKM yang di monev |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentasi Fasilitas Kesehatan terakreditasi | Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah pelaksanaan Monev dan Kalibrasi alat kesehatan | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah pelaksanaan Monev dan Kalibrasi alat kesehatan |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks keluarga Sehat | Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah PKM yang mendapatkan Dana BOK dan Jampersal | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah PKM yang mendapatkan Dana BOK dan Jampersal |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Lokasi yang mendapat penanganan Korban Bencana | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana | Jumlah Lokasi yang mendapat penanganan Korban Bencana |
| | | | | Pegelolaan Upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentasi Fasilitas Kesehatan terakreditasi | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Operasional PKM yang mendapatkan biaya operasional / pemeliharaan UPT | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Operasional PKM yang mendapatkan biaya operasional / pemeliharaan UPT |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Desa / Kelurahan Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Desa Yang difasilitasi pemicuan pembangunan jamban dan perilaku hidup sehat (Desa) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Desa Yang difasilitasi pemicuan pembangunan jamban dan perilaku hidup sehat (Desa) |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|--|--|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks keluarga Sehat | Penerbitan Izin RS Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan RS Kelas C dan D | Jumlah sarana kesehatan rujukan yang mendapat izin operasional |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Presentasi Fasilitas Terakreditasi | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Operasional RS yang mendapat biaya operasional | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Operasional RS yang mendapat biaya operasional |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Tradisional | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Tradisional |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Kunjungan Keluarga Terbina | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Kunjungan Keluarga Terbina |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah UKBM yang dibina | Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah UKBM yang dibina |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks keluarga Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | |

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Militus | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkolosis | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | |
| | | | | Operasional Pelayanan Puskesmas | |
| PROGRAM PEMENUHAN UAPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prosentase Balita Gizi Buruk | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan (Paket) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan (Paket) |
| | | | Jumlah PKM yang melaksanakan program penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, KVA dan Zat Gizi mikro lainnya (Paket) | | Jumlah PKM yang melaksanakan program penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, KVA dan Zat Gizi mikro lainnya (Paket) |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prosentase Balita Gizi Buruk | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah pemantauan terhadap PKM terhadap pelaksanaan KADARZI | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah pemantauan terhadap PKM terhadap pelaksanaan KADARZI |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Gizi Buruk | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yang mendapat supervisi dan monev program gizi (Kegiatan) | Pengelolaan pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah PKM yang mendapat supervisi dan monev program gizi (Kegiatan) |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prosentase Balita Gizi Buruk | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Monitoring pelaksanaan stunting di wilayah Locus (Kegiatan) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Monitoring pelaksanaan stunting di wilayah Locus (Kegiatan) |
| | | | Jumlah Monitoring pelaksanaan stunting di wilayah Locus (Kegiatan) | | Jumlah Monitoring pelaksanaan stunting di wilayah Locus (Kegiatan) |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Desa / Kelurahan Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah monev program kesling dan kesjaor | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah monev program kesling dan kesjaor |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | |
| | Cakupan Desa / Kelurahan Sehat | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi tempat pengolahan makana (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum | Jumlah pemeriksaan kualitas Damiu dan Sumber Air Bersih tersedia | Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan sertifikat Laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot Air Minum (DAM) | Jumlah pemeriksaan kualitas Damiu dan Sumber Air Bersih tersedia |
| | | | Jumlah pemeriksaan kualitas Damiu dan Sumber Air Bersih tersedia | | Jumlah pemeriksaan kualitas Damiu dan Sumber Air Bersih tersedia |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan Desa / Kelurahan Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Laporan penyelenggaraan KKS tersedia (Dokumen) | Penyelenggaraan Kabuapten Sehat | Jumlah Dokumen Laporan penyelenggaraan KKS tersedia (Dokumen) |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan penemuan dan penagnanan penyakit DBD | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah kegiatan pelaksanaan (Fooging) dilokasi kejadian DBD | Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah kegiatan pelaksanaan (Fooging) dilokasi kejadian DBD |
| | Angka Kematian Balita | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak sekolah | Pengelolaan Pelayanan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak sekolah |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah pelaksnaan pencegahan dan penaggulangan penyakit menular | Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah pelaksnaan pencegahan dan penaggulangan penyakit menular |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka kematian Bayi dan Balita | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Bayi, Balita yang di imunisasi | Pengelolaan Pelayanan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi, Balita yang di imunisasi |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Balita | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah kegiatan pelaksanaan surveillance epidemiologi | Pengelolaan Surveillance Kesehatan | Jumlah kegiatan pelaksanaan surveillance epidemiologi |
| | | | | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | Penyelenggaraan Sistem informasi secara terintegrasi | Jumlah PKM yang melaksanakan program P2 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah PKM yang melaksanakan program P2 |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yg di monev | Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah PKM yg di monev |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan penemuan dan penagnanan penyakit DBD | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus DBD | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus DBD |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka kejadian malaria (per 1000 penduduk) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus Malaria | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus Malaria |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Prevalensi HIV/AIDS (per 1000 penduduk) | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus HIV / AIDS | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular | Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan kasus HIV / AIDS |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Presentasi Fasilitas Terakreditasi | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Cakupan sarana / fasilitas kesehatan yang terakreditasi | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota | Cakupan sarana / fasilitas kesehatan yang terakreditasi |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Presentasi Fasilitas Terakreditasi | Penerbitan Izin RS kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota | Jumlah pelaksanaan Monev fasilitas kesehatan swsta | Peningkatan Tata Kelola RS dan Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah pelaksanaan Monev fasilitas kesehatan swsta |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah pelaksanaan kegiatan binaan program penanggulangan kemiskinan daerah | Pengelolaan pelayanan Kesehatan Khusus | Jumlah pelaksanaan kegiatan binaan program penanggulangan kemiskinan daerah |

| | | | | | |
|---|------------------------|--|---|--|---|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan pasien | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yang terbangun | Pembangunan Puskesmas | Jumlah PKM yang terbangun |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan pasien | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Puskesmas pembantu Yang terbangun | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Puskesmas pembantu Yang terbangun |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan pasien | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Paket sarana dan prasarana PKM yang diadakan | Pengadaan Sarana fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Paket sarana dan prasarana PKM yang diadakan |
| | | | | Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan pasien | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PUSTU yang akan direhabilitasi | Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya | Jumlah PUSTU yang akan direhabilitasi |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan pasien | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah RS yang terbangun | Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan Parasarana pendukungnya | Jumlah RS yang terbangun |

| | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan pasien | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Alat kesehatan dan yang tersedia | Pengadann alat kesehatan / alata penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Alat kesehatan dan yang tersedia |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Kepuasan pasien | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Obat yang tersedia | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Obat yang tersedia |
| | | | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Cakupan PKM yang bekerjasama dengan BPJS | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Cakupan PKM yang bekerjasama dengan BPJS |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angak kematian Balita | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yang di Monev (Kegiatan) | Pengelolaan pelayanan Kesehatana Balita | Jumlah PKM yang di Monev (Kegiatan) |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Balita | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | Pengelolaan Pelayanan Balita | Jumlah Peserta Lomba Balita Sehat |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan Lansia | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan Lansia |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian Ibu | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Ibu Hamil dan melahirkan secara berkala | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil dan melahirkan secara berkala |
| | | | | Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka kematian Ibu | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Peserta Orientasi ANC (Kegiatan) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Peserta Orientasi ANC (Kegiatan) |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka kematian Ibu | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Peserta AMP | Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Peserta AMP |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angk kematian Bayi | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yang di Monev (Kegiatan) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah PKM yang di Monev (Kegiatan) |
| | | | | Pengelolaan pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | |
| | | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | |
| | | | | Pengelolaan pelayanan Kesehatan Balita | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Indeks Keluarga Sehat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah peserta pelatihan Posbindu Penyakit tidak menular | Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah peserta pelatihan Posbindu Penyakit tidak menular |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan idera dan fungsional | Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan idera dan fungsional |

| PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yang mendapat Monev P2PTM dan Keswa | Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Jumlah PKM yang mendapat Monev P2PTM dan Keswa |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kerja Kabupaten / Kota | Jumlah Aplikasi SDM yang digunakan (jenis) | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Aplikasi SDM yang digunakan (jenis) |
| | | | | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan | |
| | | | | Penyelenggaraan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kabupaten / Kota | | Distribusi dan pemerataan Sumber Daya Manusia | |
| | | | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | |
| | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | | Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | | | | Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|---|
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Indeks keluarga Sehat | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Komptensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | | Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusa Kesehatan | Jumlah Pengelola Obat di RS, PKM dan PUSTU dan yang mendapat pembinaan pengelolaan obat |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Gizi Buruk | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabaten / Kota | Jumlah tenaga yang mengikuti Bimtek program Gizi (Kegiatan) | Penyelenggaraan Pelatihan untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah tenaga yang mengikuti Bimtek program Gizi (Kegiatan) |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Angka Kematian Balita | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabaten / Kota | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita |
| | | | | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan | |
| | | | | Penyelenggaraan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|---|--|
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Angka kematian Ibu | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabaten / Kota | Jumlah Peserta APN (Orang) | Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan | Jumlah Peserta APN (Orang) |
| | | Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan | | Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan | |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabaten / Kota | Jumlah peserta pelatihan Posbindu Penyakit tidak menular | Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah peserta pelatihan Posbindu Penyakit tidak menular |
| | | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP | Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Pameran yang diikuti / dilaksanakan (Kegiatan) | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Pameran yang diikuti / dilaksanakan (Kegiatan) |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|---|--|
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Indeks keluarga Sehat | Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM yang mendapat monev | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya kesehatan (UKBM) | Jumlah PKM yang mendapat monev |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Indeks keluarga Sehat | Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Media promosi dan informasi kesehatan yang tersedia | Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Media promosi dan informasi kesehatan yang tersedia |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten / Kota | Jumlah PKM sasaran Monev | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya kesehatan (UKBM) | Jumlah PKM sasaran Monev |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|--|
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten / Kota | | Peningkatan Upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat | |
| | | Pengembangan dan pelaksanaan Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten / Kota | | Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya kesehatan (UKBM) | |
| | | | | | |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Indeks keluarga Sehat | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisoonal (UMOT) | Jumlah sarana yang mendapat bimtek dibidang obat, makanan dan minuman | Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional | Jumlah sarana yang mendapat bimtek dibidang obat, makanan dan minuman |
| | | Penerbitan stiket pembinaan pada makanan jajanan sentra makanan | | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jaminan dan sentra makanan jajanan | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|---|
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DANA MAKANAN MINUMAN | Cakupan Desa / Kelurahan Sehat | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene sanitasi tempat pengolahan makana (TPM) antara lain jasa boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum | Jumlah penyuluhan TTU, TPM dan TPU terhadap masyarakat (Kegiatan) | Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan sertifikat Laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot Air Minum (DAM) | Jumlah penyuluhan TTU, TPM dan TPU terhadap masyarakat (Kegiatan) |
| | | | Jumlah Kebijakan yang disosialisasikan | | Jumlah Kebijakan yang disosialisasikan |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DANA MAKANAN MINUMAN | | Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makana dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh indutri Rumah Tangga | Jumlah bimbingan teknis makanan hasil industri | Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh indutri rumah tangga | Jumlah bimbingan teknis makanan hasil industri |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Adapun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | RENCANA TAHUN 2022 | |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| | KESEHATAN | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Indikator Program Prioritas Perangkat Daerah yang realisasi target capaian kinerjanya tinggi (>75%) | | | | | | | |
| 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | | | | | | | |
| 1.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen) | Kab. Bone | 2 | | | | 2 | 36,368,370 |
| 1.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun | Kab. Bone | 2 | 14,094,600 | DAU | | 2 | 15,497,440 |
| 1.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun | Kab. Bone | 1 | | | | 1 | 10,937,450 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----|----------------|-----|--|-----|----------------|
| 1.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Pelaporan hasil Kinerja Perangkat daerah (Dokumen) | Kab. Bone | 2 | | | | 2 | |
| 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan | Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Bulan) | Kab. Bone | 12 | 67,363,275,244 | DAU | | 12 | 70,595,018,000 |
| 1.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Capaian Admisntrasi Tugas ASN | Kab. Bone | 100 | - | | | 100 | |
| 1.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Realisasi Pembayaran Insentif/Honorarium per bulan bagi Pengelola Keuangan Perangkat Daerah (Bulan) | Kab. Bone | 12 | - | | | 12 | 36,000,000 |
| 1.02.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun (Bulan) | Kab. Bone | 12 | - | | | 12 | |
| 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 1.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan per triwulan (Jenis) | Kab. Bone | 12 | 4,838,550 | DAU | | 12 | 10,062,000 |
| 1.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan (Paket) | Kab. Bone | 7 | 136,920,340 | DAU | | 7 | 148,630,870 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|-----|---------------|-----|--|-----|---------------|
| 1.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan per triwulan (Paket) | Kab. Bone | 1 | 4,973,500 | DAU | | 1 | 4,957,500 |
| 1.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan | Kab. Bone | 1 | - | | | 1 | |
| 1.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan (Media) | Kab. Bone | 7 | 8,700,000 | DAU | | 7 | 10,000,000 |
| 1.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (Kegiatan) | Kab. Bone | 200 | 266,200,000 | DAU | | 200 | 272,600,000 |
| | - | | | | | | | | |
| 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 1.02.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan sesuai rencana kebutuhan (Unit) | Kab. Bone | 15 | 1,843,100,000 | DAK | | 29 | 3,600,000,000 |
| 1.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Meubeler Kantor sesuai rencana kebutuhan (Set) | Kab. Bone | 3 | 155,800,000 | | | 3 | 200,130,800 |
| | - | | | | | | | | |
| 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|-----|---------------|-----|--|-----|-------------|
| 1.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi per bulan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan (Rekening) | Kab. Bone | 156 | 208,220,000 | DAU | | 156 | 233,412,000 |
| 1.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Dinkes dan Puskesmas) (Bulan) | Kab. Bone | 12 | 1,984,419,200 | DAU | | 12 | 222,000,000 |
| | | - | | | | | | | |
| 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 1.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun (Unit) | Kab. Bone | 12 | 196,600,000 | DAU | | 12 | 123,750,000 |
| 1.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan per triwulan (Unit) | Kab. Bone | 30 | 11,820,000 | DAU | | 31 | 42,810,000 |
| 1.02.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket) | Kab. Bone | 0 | - | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP | | | | | | | |
| 1.02.02.2.01.02 | Pembangunan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang dibangun (Unit) | Kab. Bone | 2 | - | | | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------|-------|----------------|-----------------------|--|-------|----------------|
| 1.02.02.2.01.04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas tenaga Kesehatan yang dibangun (Unit) | Kab. Bone | 3 | 1,605,000,000 | DAK | | 5 | 200,000,000 |
| 1.02.02.2.01.10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang direhabilitasi dan mendapatkan pemeliharaan (Unit) | Kab. Bone | 16 | 15,997,500,658 | DAK | | 19 | 3,615,317,643 |
| 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah prasarana pendukung yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan lainnya (Paket) | Kab. Bone | 22 | 4,920,672,682 | DAK, DAU, Pajak Rokok | | 17 | 243,062,800 |
| 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Paket) | Kab. Bone | 40 | 18,356,748,358 | DAK | | 40 | 18,697,694,332 |
| 1.02.02.2.01.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah alat kesehatan Puskesmas yang terkalibrasi (Paket) | Kab. Bone | 13 | 99,098,000 | | | 40 | 507,740,000 |
| 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu yang mendapatkan Obat dan vaksin (Puskesmas) | Kab. Bone | 38 | 5,608,631,000 | DAK | | 38 | 3,033,292,960 |
| 1.02.02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Puskesmas yang mendapat obat, vaksin, BMHP, makan minum (Puskesmas) | Kab. Bone | 38 | 116,708,000 | DAU | | 38 | |
| | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Sediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP | | | | | | | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | Kab. Bone | 12202 | 25,407,000 | DAU, DAK | | 12324 | 51,369,700 |
| 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | Kab. Bone | 11648 | 3,246,018,500 | DAK Non Fisik | | 11764 | 3,258,962,900 |
| 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | Kab. Bone | 11093 | 51,240,000 | | | 11204 | 307,351,370 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|--------|-------------|-----|--|--------|-------------|
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | Kab. Bone | 54258 | 36,370,000 | | | 54801 | 36,507,750 |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | Kab. Bone | 11767 | 22,547,500 | | | 11885 | 22,389,110 |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan skreaning kesehatan sesuai standar (Jiwa) | Kab. Bone | 457844 | - | | | 483565 | 21,634,850 |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (Jiwa) | Kab. Bone | 109872 | 18,400,000 | | | 110971 | 17,583,730 |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (Jiwa) | Kab. Bone | 1400 | 300,000,000 | | | 1400 | 300,000,000 |
| 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kejadian KLB (%) | Kab. Bone | 95 | 556,832,500 | | | 97 | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Prevalensi kekurangan gizi (Underweight) pada anak Balita (%) | Kab. Bone | 3.6 | 866,857,600 | DAU | | 3.5 | 992,908,760 |
| | | Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada anak dibawah lima tahun (%) | | 7.99 | | | | 7.98 | |
| | | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. (%) | | 5.16 | | | | 5.15 | |
| | | Prevalensi bumil KEK (%) | | 14.99 | | | | 14.98 | |
| | | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI (%) | | 76 | | | | 77 | |
| | | Cakupan Balita Gizi Buruk yang ditangani (%) | | 100 | | | | 100 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|---------------|-------------|-----|--|---------------|-------------|
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah kabupaten / kota yang melaksanakan kesehatan kerja (%) | Kab. Bone | 25 | 100,449,600 | DAU | | 30 | 152,597,000 |
| | | Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan kesehatan olahraga (%) | | 25 | | | | 30 | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Desa /Kelurahan Yang melaksanakan STBM (Desa) | Kab. Bone | 372 | 159,551,400 | DAU | | 372 | 218,842,150 |
| | | Persentase Tempat Pengolahan Makanan Yang dibina (%) | | 80 | | | | 90 | |
| | | Persentase Tempat-tempat Umum yang dibina (%) | | 80 | | | | 90 | |
| | | Persentase Rumah Sehat yang diawasi (%) | | 80 | | | | 90 | |
| | | Persentase Pengawasan Kualitas Air minum (%) | | 80 | | | | 90 | |
| | | Persentase Pengawasan Limbah B3 di fasyankes (%) | | 80 | | | | 90 | |
| | | Persentase Tempat- Pestida yang diawasi (%) | | 80 | | | | 90 | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah UKBM yang dibina (UKBM) | Kab. Bone | 6 | 350,564,200 | DAU | | 7 | |
| 1.02.02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Tradisional (Puskesmas) | Kab. Bone | 38 | 19,999,700 | DAU | | 38 | 73,096,780 |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah kegiatan pelaksanaan surveillance epidemiologi | Kab. Bone | 95 | 626,642,000 | | | 97 | 218,557,280 |
| 1.02.02.2.02.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PIS PK dan Perkesmas (Puskesmas) | Kab. Bone | 38 | 144,116,000 | | | 38 | 398,699,600 |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Cakupan penemuan dan penanggulangan penyakit DBD (Inciden Rate)per.100.000 pddk | Kab. Bone | < 49 /100.000 | 336,933,700 | | | < 49 /100.000 | 550,321,620 |
| | | Prevalensi Rate Kusta per.10.000 pddk | | < 1,5/10.000 | | | | < 1,2/10.000 | |
| | | API (Annual Parasit Infection) Malaria < 1 per.1000 Pddk. | | < 1 / 1000 | | | | < 1 / 1000 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-------|-----------------|---------------|--|-------|-----------------------|
| | | Jumlah pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | | 100 | | | | 100 | |
| | | Jumlah penemuan kasus gangguan indera penglihatan dan pendengaran (Jiwa) | | 10000 | | | | 12000 | |
| | | Jumlah peserta pelatihan posbindu (Orang) | | 1115 | | | | 1485 | |
| 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Pembayaran Tagihan BPJS Premi Kapitasi dan Non Kapitasi (Bulan) | Kab. Bone | 12 | 153,171,550,103 | | | 12 | 151,471,210,679 |
| 1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Laporan penyelenggaraan KKS tersedia (Dokumen) | Kab. Bone | 1 | 100,037,900 | | | 1 | 146,075,150 |
| 1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Operasional RS yang mendapat biaya operasional (RS) | Kab. Bone | 1 | 10,500,000,000 | | | 1 | 10,942,250,000 |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang memiliki Biaya Operasional (Puskesmas) | Kab. Bone | 38 | 34,199,890,000 | DAK Non Fisik | | 38 | Terinci per Puskesmas |
| 1.02.02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah pemeriksaan kualitas Damu dan Sumber Air Bersih tersedia (Unit) | Kab. Bone | 1 | 67,999,850 | | | 1 | 10,114,650 |
| 1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Puskesmas yang terakreditasi (Puskesmas) | Kab. Bone | 15 | 2,402,593,517 | | | 25 | 619,967,860 |
| | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi | | | | | | 0 | |
| 1.02.02.2.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan Website (Paket) | Kab. Bone | 1 | 36,366,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Izin Operasional RS Type C dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | | | | | |
| 1.02.02.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana Yang mendapatkan Izin Operasional (RS dan Klinik Utama) | Kab. Bone | 8 | 324,986,000 | | | 9 | 399,974,400 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|----|---------------|--|--|----|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Tenaga Kesehatan yang bersertifikasi | | | | | | | |
| 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase kebutuhan SDM untuk UKP dan UKM di Pemberi Pelayanan Kesehatan | | | | | | | |
| 1.02.03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan dan Mendapatkan Jasa Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 | Kab. Bone | 39 | 6,593,368,395 | | | 39 | 30,400,000 |
| | | | | | | | | | |
| 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase SDM yang mendapat Peningkatan Kompetensi di Bidang Kesehatan | | | | | | | |
| 1.02.03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah tenaga SDM yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi | Kab. Bone | 39 | 696,320,000 | | | 39 | |
| | | | | | | | | | |
| 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase pemenuhan sediaan farmasi | | | | | | | |
| | | Persentase pemenuhan sediaan alat kesehatan | | | | | | | |
| 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Cakupan realisasi pemberian izin bagi Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi syarat | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------|----|------------|--|--|----|------------|
| 1.02.04.2.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah sarana yang mendapat bimtek dibidang obat, makanan dan minuman (Sarana) | Kab. Bone | 50 | - | | | 60 | 42,000,000 |
| 1.02.04.2.01.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Pengelolaan Data Perizinan selama 1 tahun (Kali) | Kab. Bone | 4 | 20,449,050 | | | 4 | 34,182,800 |
| | | | | | | | | | |
| 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Sarana Yang Mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat (sarana) | | | | | | | |
| 1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Sarana Yang Mendapatkan Pengawasan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat (sarana) | Kab. Bone | 60 | 96,173,950 | | | 65 | 89,500,000 |
| | | | | | | | | | |
| 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Cakupan realisasi Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|----|-------------|--|--|----|-------------|
| 1.02.04.2.06.01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah sarana yang mendapatkan pengawasan (Sarana) | Kab. Bone | 80 | 66,200,000 | | | 80 | 23,700,000 |
| | | | | | | | | | |
| 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase penduduk yang menerapkan Prilaku Hidup dan Sehat (PHBS) | | | | | | | |
| 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Mitra Potensial | | | | | | | |
| 1.02.05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Strata Purnama dan Mandiri Siaga Aktif yang ditingkatkan | Kab. Bone | 95 | 126,640,000 | | | 97 | 284,345,600 |
| 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Upaya Promotif dan Prefentiv (Indikator Germas) yang dilaksanakan | | | | | | | |
| 1.02.05.2.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Media promosi dan informasi kesehatan yang tersedia | Kab. Bone | 5 | - | | | 6 | 214,122,890 |

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Kesehatan tahun anggaran 2018 merupakan rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan.

Indikator-indikator kinerja beserta target dari setiap program dan kegiatan juga dituangkan, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur.

Diharapkan hasil pelaksanaan pada tahun 2021 akan memberikan hasil yang optimal sekaligus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

